

SKRIPSI

**TATA KELOLA KEPARIWISATAAN BERBASIS MASYARAKAT
DI KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

Disusun dan Diusulkan oleh :

WIDI SAFITRI

Nomor Stambuk :105610503214



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITASMUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

**TATA KELOLA KEPARIWISATAAN BERBASIS MASYARAKAT
DI KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

WIDI SAFITRI

Nomor Stambuk : 10561 05032 14

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi :Tata Kelola Kepariwisata Berbasis Masyarakat di
Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

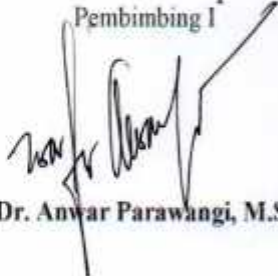
Nama Mahasiswa : Widi Safitri

Nomor Stambuk : 10561 05032 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Anwar Parawangi, M.Si

Pembimbing II



Dr. Hafiz Elfiansyah Parawu, S.T, M.Si


Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Nasrulhaq, S. Sos, MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0034/FSP/A.1-VIII/140/2019 sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Sabtu tanggal 12 Januari tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Burhanuddin, S. Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Lukman Hakim, M. Si (Ketua)
2. Dr. H. Anwar Parawangi, M. Si
3. Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si
4. Drs. Ruskin Asikin, MM






PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widi Safitri

Nomor Stambuk : 10561 05032 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan oleh orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 12 Januari 2019

Yang menyatakan,



Widi Safitri

ABSTRAK

WIDI SAFITRI. *Tata Kelola Kepariwisata Berbasis Masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara* (dibimbing oleh Anwar Parawangi dan Hafiz Elfiansyah)

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang sampai saat ini terus dikembangkan sebagai sumber pendapatan. Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dengan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan sehingga pemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan untuk masyarakat. Namun dalam proses tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Desa Lero Kecamatan Masamba menghadapi berbagai kendala diantaranya yaitu permasalahan sumber daya dan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tata kelola kepariwisataan berbasis masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara khususnya di Desa Lero. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 9 orang pemilihan informan dilakukan berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian serta keberadaannya di lokasi penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa objek wisata yang ada di Desa Lero dikelola langsung oleh masyarakat dengan tujuan menjadikan Desa Lero sebagai desa wisata yang mandiri. Namun dalam pengelolaannya masyarakat menemukan kendala pada sumber daya dalam pengembangan objek wisata serta aksesibilitas menuju objek wisata. Masyarakat berharap dalam pengelolaan objek wisata berbasis masyarakat mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Kata Kunci : *Tata Kelola, Kepariwisata Berbasis Masyarakat*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya kepada kita semua, termasuk nikmat iman, islam dan sehat wal'afiat. Atas segala nikmat tersebut pula sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta tak lupa juga kepada kita yang senantiasa *istiqomah* dan ikhlas sebagai umatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana sosial pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi Universitas Muhammadiyah Makassar yang mana judul penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu “ **Tata Kelola Kepariwisata Berbasis Masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara**”

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, ayahanda Baharuddin dan ibunda Ambeng atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita. Ucapan terima kasih kepada saudara saya Ceria Amalia serta keponakan saya Vivid Septiani Samsuaib beserta segenap keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil demi kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, ayahanda Dr. Anwar Parawangi, M.Si selaku pembimbing I dan ayahanda Dr. Hafiz Elfiansyah Parawu, S.T, M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Pada kesempatan luar biasa ini peneliti juga ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Ayahanda Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Dr. Burhanuddin S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unniversitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kakanda Nasrul Haq, S.Sos, MPA selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan Administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan

seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.

6. Kepada seluruh keluarga besar fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, terutama kepada Irma Putri Suriadi, satu angkatan 2014 Ilmu Administrasi Negara terspecial kelas F, tanpa terkecuali yang sama-sama berjuang meraih gelar sarjana.
7. Kakanda, Adinda, dan teman-teman Pengurus CESIST yang senantiasa memberikan motivasi.
8. Sahabatku *crew* “Geng Beneran” yang tanpa henti memberikan semangat, dukungan dan doa serta senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman AFILIASI 2014 yang selalu memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi.
10. Serta tak lupa peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak Asbir selaku kepala Desa Lero dan seluruh informan yang telah banyak berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini serta segala pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Diakhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kehilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 12 Januari 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Widi Safitri', enclosed within a faint rectangular border.

Widi Safitri

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Manajemen	7
B. Konsep Pariwisata.....	16
C. Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat	18
D. Kerangka Berpikir	23
E. Fokus Penelitian	24
F. Deskripsi Fokus.....	25

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Informan Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30

G. Keabsahan Data.....	31
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Objek Penelitian	33
B. Hasil Penelitian Tata Kelola Kepariwisata Berbasis Masyarakat di Kecamatan Masamba	49
C. Pembahasan.....	75
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Objek wisata Desa Lero	3
Tabel 3.1 Informan penelitian	29
Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Lero.....	37
Tabel 4.2 Jumlah penduduk Desa Lero berdasarkan jenis pekerjaan	38
Tabel 4.3 Tingkat pendidikan penduduk Desa Lero	39
Tabel 4.4 Perangkat Desa Lero	41
Tabel 4.5 Jumlah pengunjung objek wisata di Desa Lero	46
Tabel 4.6 Data realisasi pendapata asli Desa Lero tahun 2016-2017	47
Tabel 4.7 Jenis dan besaran pungutan di objek wisata.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Fungsi manajemen Terry.....	17
Gambar 2.2 Kerangka berpikir.....	24
Gambar 4.1 Peta administrasi Kecamatan Masamba.....	33
Gambar 4.2 Struktur organisasi Desa Lero	40
Gambar 4.3 struktur organisasi BUMDes Maipi Lestari	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan pariwisata tidak hanya tentang kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, daya tarik dan ciri khas tersendiri suatu objek wisata, serta kelompok sosial maupun komunitas yang bersangkutan dengan objek wisata namun bisa saja pengelolaan suatu objek wisata juga terdapat aktifitas lain yang dapat mendukung dalam sektor ekonomi suatu daerah. Pengelolaan suatu objek wisata bukan hanya seputar pengembangan serta pemanfaatan daya Tarik wisata itu sendiri melainkan bagaimana dalam pengelolaannya pemerintah maupun masyarakat selaku pelaksana mampu menjaga kelestarian alam, kemajemukan budaya, adat istiadat serta agama.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan mengamanatkan bahwa salah satu tujuan kegiatan kepariwisataan adalah upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam rangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan. Salah satu prinsip Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 ini juga adalah memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, proporsionalitas dengan tujuan meningkatkan kebutuhan

ekonomi, menentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran serta meningkatkan kebudayaan dan kelestarian lingkungan.

Kementrian kebudayaan dan Pariwisata melakukan inovasi terbaru dengan menggagas tata kelola daerah tujuan wisata berlabel DMO (*Destination Management Organization*) yang mana dikenal sebagai pengelolaan destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis dengan memanfaatkan jejaring informasi dan teknologi yang tersistem secara terpadu dengan peran serta masyarakat, palaku/kelompok, industri, akademisi serta pemerintah. Hal ini bertujuan untuk melihat kualitas pengelolaan pariwisata, volume pengunjung, lama tinggal serta besaran pengeluaran wisatawan tidak lupa bagaimana manfaatnya terhadap masyarakat lokal. (lipi.go.id, publikasi 18 Mei 2011)

Belakangan ini telah muncul model pembangunan yang sesuai dengan pengembangan pariwisata yang berbasis kepada masyarakat, model pembangunan ini tidak lain dapat berfungsi sebagai suatu usaha pemerintah dalam pendayagunaan masyarakat dimana masyarakat diikutsertakan dalam pengelolaan pariwisata yang berbasis masyarakat. Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dengan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan sehingga pemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan untuk masyarakat.

Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki banyak potensi alam dan budaya. Di Desa Lero sendiri terdapat beberapa objek wisata yang menarik diantaranya Rumah Pohon, wisata alam

Permandian Maipi, air terjun Sarambu Alla dan banyak lainnya. Objek-objek wisata yang berada di Desa Lero Kecamatan Masamba ini sendiri merupakan objek wisata yang dikelola sendiri oleh masyarakat setempat.

Salah satu desa di Kecamatan Masamba memiliki destinasi pariwisata berbasis masyarakat yakni Desa Lero, terdapat beberapa objek wisata potensial yang berada di desa tersebut beberapa diantaranya sebagai berikut :

Table 1.1 Jumlah Pengunjung Objek Wisata Desa Lero per Tahun.

NO.	OBJEK WISATA	TAHUN	
		2016	2017
1.	Wisata Alam Permandian Maipi	5.500	5.796
2.	Rumah Pohon	3.480	3.588
3.	Air terjun Sarambu Alla	3.480	3.575

(Sumber : data pengunjung pertanggal 22 oktober 2017)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bagaimana peningkatan jumlah pengunjung per tahunnya. Objek wisata tersebut merupakan objek wisata berbasis masyarakat salah satunya Rumah Pohon. Meskipun pada awalnya dibentuk hanya sebagai rumah edukasi namun ketertarikan masyarakat atas keunikan Rumah Pohon ini mulai diminati banyak pengunjung baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Sumber dana awal pembentukan Rumah Pohon ini dengan memanfaatkan swadaya masyarakat setempat serta dengan memanfaatkan limbah sampah daur ulang.

Keuntungan dari hasil yang diperoleh dari Rumah Pohon ini sendiri digunakan pengelola untuk membenahi serta membangun bangunan Rumah Pohon sendiri dengan membeli sampah daur ulang pada masyarakat sehingga masyarakat setempat dapat terberdayakan dengan adanya objek wisata Rumah Pohon ini, dalam hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam mencanangkan program peduli lingkungan. Tidak hanya itu, dengan adanya objek wisata Rumah Pohon ini dapat membantu perekonomian dengan adanya usaha-usaha seperti kuliner, akomodasi dan transportasi.

Namun, dalam pengelolaan objek wisata yang ada di Desa Lero ini masih menemui beberapa kendala yang menghambat dalam proses pengelolaannya. Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam proses pengelolaan objek wisata yang ada di Desa Lero.

Pertama, permasalahan anggaran pengembangan, adanya keterbatasan anggaran menyebabkan pihak pengelola dalam mengembangkan program kesulitan. Dengan terbatasnya anggaran yang pengelola pariwisata untuk porsi bidang pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata menyebabkan program-program yang dilakukan hanya bersifat insidental dan tidak dilakukan secara rutin.

Kedua, permasalahan lahan dimana lahan yang digunakan sebagai objek wisata merupakan lahan milik warga sehingga dibutuhkan negosiasi antara pemerintah desa dan pihak pengelola dengan masyarakat bersangkutan untuk menghindari kesalahpahaman,

Ketiga, permasalahan aksesibilitas dimana dalam suatu kegiatan pengelolaan pariwisata sangat penting peran transportasi, restorasi dan akomodasi. Karena dalam kegiatan wisata cepat atau lambat sangat memengaruhi dampak terhadap perekonomian masyarakat. Dibutuhkan pembangunan secara berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, sebab besar harapan peningkatan perekonomian masyarakat dari pengelolaan pariwisata serta mampu menjadikan masyarakat mandiri terberdayakan. Serta dalam pengelolaannya diharapkan kerjasama antar pihak pengelola dan masyarakat sebagaimana pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan kepuasan terhadap pengunjung sehingga penting bagi pengelola untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kearifan budaya lokal.

Pengelolaan berbasis masyarakat dalam pengembangan objek wisata di Desa Lero ini, tak akan berhasil tanpa adanya perhatian dari multipihak untuk membantu keberhasilan pengelolaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan adanya objek wisata ini diharapkan dapat membantu pemerintah setempat dalam memberdayakan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang mandiri. Berdasarkan uraian di atas, maka yang ingin saya kaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana tata kelola dari kepariwisataan yang berbasis masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, ini menjadi menarik untuk melakukan penelitian tentang **Tata Kelola Kepariwisataan Berbasis Masyarakat di Kecamatan masamba Kabupaten Luwu Utara.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka dalam penelitian ini mengemukakan rumusan masalah, Bagaimana tata kelola kepariwisataan berbasis masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dikemukakan adapun tujuan dari penelitian ini yakni, Untuk mengetahui tata kelola kepariwisataan berbasis masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

2. Manfaat penelitian

- a. Salah satu wujud kontribusi akademik dalam mengembangkan konsep-konsep pengelolaan berbasis masyarakat.
- b. Bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu administrasi negara dalam era otonomi daerah ini.
- c. suatu gagasan dan solusi bagi aparatur birokrasi di daerah maupun kelompok masyarakat lainnya agar mendapat wawasan baru tentang pengelolaan objek wisata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Pengertian manajemen banyak kita temukan dalam beberapa literatur diantaranya manajemen sebagai suatu proses kerja sama, manajemen sebagai kumpulan orang-orang yang melakukan aktivitas dan manajemen sebagai suatu seni dan suatu ilmu pengetahuan Manullang, 1996 (Effendi, 2014: 2). Secara praktis manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pencapaian tujuan yang dilakukan oleh manajemen puncak melalui kegiatan orang lain.

Definisi manajemen berdasarkan optimasi, koordinasi dan integrasi sumberdaya yang menekankan pada koordinasi dan integrasi kegiatan kerja atau kerjasama pelaksanaan tugas-tugas yang dikemukakan oleh masing-masing ahli diantaranya, Robbins dan Coulter (Effendi, 2014: 5) manajemen adalah mengkoordinasikan kegiatan kerja sehingga diselesaikan secara efektif dan efisien dengan melalui orang lain. Sepikiran dengan Robbins dan Coulter menurut Kreitner (Effendi, 2014: 4) manajemen adalah proses kerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah. Kelompok kedua menekankan manajemen sebagai proses dari fungsi-fungsi agar efektif dalam melaksanakan tugas-tugas dan efisien menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi yang

dikemukakan oleh Terry (Hasibuan, 2005: 2) manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.

Dalam pendefinisian manajemen tidak akan pernah cukup memuaskan dalam mencari pendefinisian yang sebenar-benarnya, dikarenakan proses manajemen membutuhkan waktu dan tempat yang berbeda dalam penerapannya. Yang terpenting dalam manajemen selalu mencakup : Pertama, pencapaian tujuan atau sasaran yang merupakan hal yang sangat urgen. Kedua, manajemen menyangkut hubungan dengan orang lain, dikarenakan seluruh aktivitas manajemen berhubungan dengan apa yang dikerjakan oleh anggota organisasi lainnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam pencapaian tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Adapun unsur-unsur manajemen berdasarkan definisi di atas, yaitu :

1. Kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi formal maupun nonformal,

2. Tujuan dan serta kepentingan bersama yang telah ditentukan bersama sebelumnya dalam suatu organisasi,
3. Pembagian kerja dan tanggung jawab berdasarkan fungsi kerja yang diamanatkan,
4. Hubungan formal serta standar prosedur operasional dalam pelaksanaan tugas,
5. Serta pengorganisasian manusia berdasarkan fungsinya.

2. Konsep Tata Kelola

Tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen, Kementerian kebudayaan dan Pariwisata melakukan inovasi terbaru dengan menggagas tata kelola daerah tujuan wisata berlabel DMO (*Destination Management Organization*) yang mana dikenal sebagai pengelolaan destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis dengan memanfaatkan jejaring informasi dan teknologi yang tersistem secara terpadu dengan peran serta masyarakat, palaku/kelompok, industry, akademisi serta pemerintah. Hal ini bertujuan untuk melihat kualitas pengelolaan pariwisata, volume pengunjung, lama tinggal serta besaran pengeluaran wisatawan tidak lupa bagaimana manfaatnya terhadap masyarakat lokal. (lipi.go.id publikasi 11 Mei 2011)

Dijelaskan oleh kementerian budaya dan pariwisata, dalam DMO ada empat subsistem yang saling berhubungan dan bersinggungan yaitu destinasi, tata kelola, informasi komunikasi dan teknologi serta pemasaran. Dimana keempat subsistem ini haruslah sejalan dalam pencapaian tujuan DMO itu sendiri. Dalam hal ini, tata kelola tidak hanya dipandang sebagai bentuk organisasi dalam paradigma klasik yang mengharuskan adanya bentuk hierarki pembagian tugas secara tegas dengan garis

wewenang dan penugasan. Karena DMO dibentuk dengan menjawab problematika di era globalisasi maka hendaknya DMO dipandang sebagai bentuk pengorganisasian pengelolaan destinasi dengan menggunakan pendekatan modern pula yakni dengan pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi. Ada tiga komponen penting dalam tata kelola pariwisata DMO yakni *coordination tourism stakeholders*, *destination crisis management*, dan *destination marketing*.

Konsep pengelolaan DMO ini sendiri diartikan sebagai tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis, yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi serta pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik.

3. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, yang telah terserap ke dalam Bahasa Indonesia yang dikenal dengan manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, yang mana pengaturan dilakukan melalui suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai melalui fungsi-fungsinya yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*).

Menurut Terry dan Rue (Terry dan Rue, 2008: 1) pengelolaan merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta untuk

pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Pengelolaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai suatu proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan tujuan (kamus Indonesia lengkap, 1997 : 348).

Menurut Follet, 1997 (Sule, 2009 :6) pengelolaan merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan, dalam tahap penyelesaiannya terdapat tiga faktor yang terlibat, yakni :

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung lainnya.
- b. Adanya proses yang bertahap dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Berdasarkan dengan apa yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya mengenai pengelolaan, maka yang dimaksud dengan pengelolaan dalam penelitian ini adalah serangkaian proses yang sistematis meliputi perencanaan, pelaksanaan (pengorganisasian dan pengarahan), dan pengawasan atau pengendalian terhadap

kegiatan yang dilakukan pengelola dalam mengelola objek wisata yang berbasis masyarakat.

4. Tujuan Pengelolaan

Pengelolaan dibutuhkan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi organisasi dengan menggunakan metode yang tepat. Oleh karena itu manajemen dibutuhkan oleh manusia karena memang sangat perlu untuk kehidupan manusia itu sendiri, agar hidup manusia menjadi teratur, maka manajemen membicarakan hal yang menyangkut (Effendi, 2014: 7) :

- a. Untuk mencapai tujuan, baik tujuan secara pribadi maupun tujuan organisasi
- b. Kalau dilakukan oleh orang banyak, manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan
- c. Untuk mencapai efesiensi (hubungan antara masukan dan keluaran yang bertujuan untuk meminimalisasi sumber-sumber biaya) dan efektifitas (pencapaian tujuan yang sangat berguna).

Tujuan dari pengelolaan akan tercapai secara efektif dan efesien apabila dilakukan secara tepat, adapun langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan antara lain : (a) Menentukan strategi; (b) menentukan sarana dan batas tanggungjawab; (c) menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu; (d) menentukan pengukuran pengorganisasian tugas dan rencana; (e) menentukan standar kerja yang mencakup efektifitas dan efesiensi; (f) menentukan ukuran nilai; (g) Mengadakan pertemuan; (h) Pelaksanaan; (i)

Melakuakn evaluasi; (j) Mengadakan review secara berkala; (k) Pelaksanaan tahap berikutnya (Afifuddin 2010 : 3).

Berdasarkan uraian di atas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, saarana dan prasarana secara efektif dan efesien agar tercapainya tujuan organisasi.

5. Fungsi Pengelolaan

Dalam perkembangan ilmu manajemen para ahli telah mengemukakan masing-masing pendapatnya tentang fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri. Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli.

Fayol dalam mengemukakan fungsi manajemen ada 5 fungsi diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah atau pemberian komando, pengkoordinasian serta pengawasan. Tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Fayol, Terry (Effendi, 2014 : 8) menuliskan 4 fungsi pengelolaan yang akrab dikenal dengan POAC atau Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Begitupun dengan Mee menambahkan *Motivating* sebagai bentuk yang lebih halus dari pelaksanaan namun memiliki makna yang sama.

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan di atas maka dapat dikatakan suatu pengelolaan merupakan proses yang berkaitan dengan penerapan fungsi-fungsi pengelolaan yang memiliki peranan hingga tercapainya tujuan yang ditetapkan dengan efektif dan efesien.

Pendekatan proses manajemen yang menekankan fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi yang dikerjakan manajer sebagai cara yang sistematis dan terorganisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pendekatan ini, manajemen dipandang sebagai suatu proses dari sejumlah fungsi yang saling berhubungan (*interrelated functional*). Pendekatan proses disebut juga pendekatan fungsional karena menjelaskan secara rinci fungsi dari manajemen (Silalahi, 2011 : 40).

Berikut beberapa fungsi dari pengelolaan, antara lain :

a. Perencanaan

Manajer melaksanakan fungsi pelaksanaan untuk menentukan tujuan, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan.

Pada umumnya menurut Ranupandojo (Ranupandojo, 1996:21) perencanaan yang baik disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Rencana harus memiliki tujuan khusus;
- 2) Ada kegiatan yang diprioritaskan;
- 3) Melibatkan semua orang;
- 4) Perencanaan harusnya telah memperhitungkan pelaksanaan fungsi manajemen yang lain;
- 5) Rencana harus selalu diperbaiki, dikarenakan dinamisnya situasi dan kondisi lingkungan;

6) Penanggung jawab perencanaan;

7) Semua perencanaan selalu bersifat tentative dan interim.

b. Pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan dalam pengelolaan didefinisikan oleh Westra (Adisasmita, 2011:24) sebagai usaha-usaha yang dilakukan dalam melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktunya.

Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kegiatan pelaksanaan dalam penelitian ini terdiri atas pengorganisasian dan pengarahan.

c. Pengorganisasian

Hasibuan (2005:127) pengorganisasian adalah proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk pencapaian tujuan, menempatkan orang pada setiap aktivitas, menyediakan sumber daya yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Pengorganisasian dalam penelitian ini adalah tentang penetapan dan penempatan individu tertentu pada tugas-tugas tertentu serta pendelegasian wewenang kepada individu tersebut untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

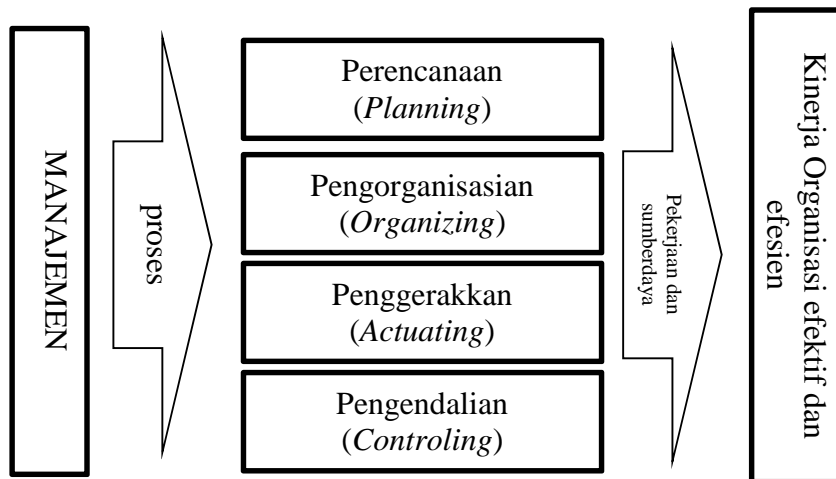
Adapun proses pengorganisasian yakni :

- 1) Manajer harus mengetahui tujuan organisasi;
- 2) Penentuan kegiatan-kegiatan;
- 3) Pengelompokkan kegiatan-kegiatan.

d. Pengawasan

Sugianto (Adisasmita, 2011:25) pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai fakta-fakta yang sebenarnya dan seharusnya dalam hal ini pengawasan dilakukan untuk membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditentukan. Secara umum terdapat sepuluh karakteristik pengawasan atau pengendalian yang efektif, yaitu :

- 1) Akurat;
- 2) Tepat waktu;
- 3) Objektif dan komprehensif;
- 4) Dipusatkan pada tempat pengendalian yang strategis;
- 5) Secara ekonomi realistik;
- 6) Secara organisasi realisti;
- 7) Dikoordinasikan dengan alur pekerjaan organisasi;
- 8) Fleksibel;
- 9) Preskriptif dan operasional;
- 10) Diterima oleh anggota organisasi;



Gambar 2.1 Fungsi Manajemen Terry (Effendi, 2014 : 8)

B. Konsep Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi, karena kegiatannya mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi nasional misalnya :

- a. Meningkatkan urbanisasi karena pertumbuhan pembangunan dan pembaharuan fasilitas wisata. hal ini meliputi pembangunan dan perbaikan prasarana dan suprasarana pariwisata.
- b. Menggugah usaha-usaha baru yang berkaitan dengan wisata misalnya: usaha-usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok wisata, perkemahan dan lain-lain), yang memerlukan perluasan beberapa beberapa industri misalnya: peralatan hotel dan kerajinan tangan.
- c. Menambah permintaan akan hasil-hasil pertanian karena bertambahnya pemakaian.

- d. Memperluas pasar barang-barang lokal.
- e. Menunjang pendapatan negara dengan masuknya pelancong dari berbagai negara sehingga mendorong peningkatan devisa negara.
- f. Memberi dampak positif pada tenaga kerja di negara, karena pariwisata memperluas lapangan kerja baru (tugas baru di tempat penginapan, usaha perjalanan, di kantor-kantor pemerintah yang mengurus sektor pariwisata, penerjemah, industri cendra mata dan kerajinan tangan serta tempat-tempat penjualan lainnya).

C. Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pengelolaan pariwisata terdapat beberapa sektor yang ikut andil serta terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan pariwisata, diantaranya Pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, swasta yang fungsinya selaku investor serta masyarakat berfungsi sebagai pelaksana dari kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata (Sunaryo, 2013:217). Berdasarkan penjelasan tersebut peran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sangatlah besar dan perlu diseimbangkan dengan peran pemerintah maupun swasta.

Sesuai dengan model pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata maka upaya yang harus diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut (Sunaryo 2013: 219):

- 1) Meningkatnya kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat pembangunan kepariwisataan.

- 2) Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat.
- 3) Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- 4) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata

Lebih lanjut dikemukakan oleh Sunaryo (Sunaryo,2013: 138) bahwa dalam pengelolaan pariwisata yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat menjadi isu model pengembangan kepariwisataan saat ini. Yang lebih dikenal dengan konsep Konstruksi pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) ini pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan konvensional (*growth oriented model*) yang seringkali mendapatkan banyak kritik telah mengabaikan hak dan meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi.

Dalam upaya meminimalisasi berbagai dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif pariwisata lahirlah pemikiran untuk mengembangkan pariwisata yang lebih berpihak pada masyarakat di sekitar objek wisata, yang kemudian dikenal dengan istilah *Community Based Tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis komunitas / masyarakat. Di Indonesia, penerapan CBT tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pada Bab III pasal 5 yaitu Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata. Dimana prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, Undang-Undang telah mengamanatkan bahwa pengembangan pariwisata Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat (lokal). Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 memberikan perubahan penting dalam hal pendekatan pembangunan pariwisata menjadi berbasis masyarakat.

Murphy (Sunaryo 2013:139) menyebutkan bahwa pada hakikatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri sehingga semestinya kepariwisataan harus dipandang sebagai kegiatan yang berbasis pada komunitas. Batasan pengertian pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* sebagai berikut:

1. Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada.
2. Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha-usaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada.
3. Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara sistematis dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada masyarakat yang kurang beruntung yang ada di destinasi.

Sesuai pendapat Murphy, Hudson dan Timothy (Sunaryo 2013:139) pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* merupakan pemahaman yang berkaitan dengan kepastian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain yang memiliki ketertarikan atau minat kepada kepariwisataan setempat, dan tata

kelola kepariwisataan yang memberi ruang kontrol yang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari atas dua perspektif, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan distribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari pembangunan pariwisata. Oleh karena itu pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat atau *community based tourism* (Sunaryo, 2013: 140), yaitu :

1. Mengikut sertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.
3. Pendidikan Kepariwisataan bagi masyarakat lokal.

Berdasarkan pendapat tersebut terlihat bahwa *Community-Based Tourism* sangat berbeda dengan pengembangan pariwisata pada umumnya (*mass tourism*). Dalam CBT, komunitas merupakan aktor utama dalam proses pembangunan pariwisata, dengan tujuan utama untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat.

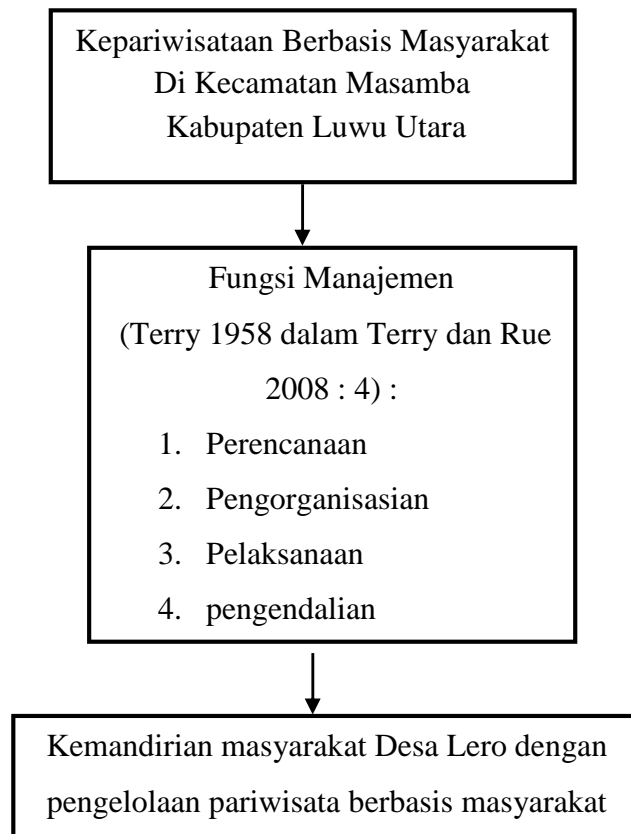
D. Kerangka Berpikir

Pariwisata Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka membantu pemasukan negara. Pariwisata sebagai suatu sektor ekonomi yang memiliki dampak berjenjang (*Multiplier effect*) mampu menghidupkan berbagai sektor ekonomi lainnya, seperti transportasi, perhotelan, kuliner, budaya dan lain sebagainya, selanjutnya pariwisata mampu menarik tenaga kerja yang banyak. Artinya, potensi pertumbuhan ekonomi akan semakin besar melalui pengelolaan pariwisata yang baik.

Penelitian mengenai pengelolaan kepariwisataan berbasis masyarakat ini untuk mencari tahu bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Penulis memfokuskan empat fungsi utama dalam pengelolaan, yaitu : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan yang menggunakan teori Ranupandojo, tujuh prinsip dan petunjuk menyusun perencanaan yang baik : a) Rencana harus memiliki tujuan khusus; b) Melibatkan semua orang; c) Ada kegiatan yang diprioritaskan; d) Memperhitungkan fungsi pengelolaan lainnya; e) Rencana harus selalu diperbaiki; f) Semua perencanaan harus bersifat tentatif dan interim; g) Adanya penanggung jawab perencanaan. Pelaksanaan menggunakan enam poin dari delapan poin teori proses pengorganisasian menurut Hasibuan, yaitu : a) Manajer harus mengetahui tujuan; b) Penentuan kegiatan-kegiatan; c) Pengelompokan kegiatan-kegiatan; d) Rentang Kendali; e) Pendelegasian wewenang; f) Peranan individu, dan ditambah dengan poin pengarahan. Sedangkan pengawasan menggunakan poin dari teori Siswnto mengenai sepuluh karakteristik pengendalian

yang efektif, delapan poin yang digunakan yaitu : a) Akurat; b) Tepat waktu; c) Terpusat; d) Secara ekonomi realistic; e) Secara organisasi realistik; f) Fleksibel; g) Dikoordinasikan dengan alur pekerjaan; h) Diterima oleh anggota organisasi.

Berikut ini merupakan Kerangka pikir dari penelitian tentang tata kelola kepariwisataan berbasis masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara :



Gambar 2.2 : Kerangka Berpikir

E. Fokus Penelitian

Dari judul penelitian ini yakni Pengelolaan kepariwisataan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, maka penulis memberikan fokus

pada penelitian ini proses pengelolaan yang dilakukan masyarakat dalam mengembangkan objek wisata berbasis masyarakat yang ada di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan melihat fungsi-fungsi manajemen diantaranya perencanaan sebagaimana diketahui merupakan langkah awal dalam menentukan kegiatan dalam proses pencapaian tujuan, pelaksanaan merupakan realisasi dari perencanaan itu sendiri dimana pada tahap ini terdapat fungsi pengorganisasian dan pengarahan. Sedangkan pada tahap pengawasan dilakukan untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses pengelolaan. Setelah mengetahui ketiga fungsi manajemen tersebut maka akan diketahui seberapa mandiri masyarakat Kecamatan Masamba dalam mengelola objek wisata yang ada pada daerah mereka masing-masing.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pengelolaan objek wisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil dan lokal semata, tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerjasama masyarakat secara global.
2. Perencanaan adalah proses persiapan secara sistematis dalam melaksanakan suatu kegiatan yang diawali dengan proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, kapan pelaksanaannya dan dimana pelaksanaannya.

3. Pengorganisasian adalah menetapkan dan menempatkan individu tertentu pada tugas-tugas tertentu, serta pendelegasian wewenang kepada individu tersebut dalam rangka pencapaian tujuan.
4. Pelaksanaan merupakan usaha yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Pengawasan merupakan usaha dalam menilai kenyataan yang telah diperoleh dalam proses pelaksanaan rencana kerja dibandingkan dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian dibuatkan perbaikan dari hasil pemantauan yang telah dilakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama dua bulan yaitu pada bulan Juli sampai Agustus 2018. Serta penelitian ini dilaksanakan di Desa Lero Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Penentuan lokasi penelitian ini merupakan pertimbangan bahwa objek wisata yang ada di Desa Lero merupakan kepariwisataan berbasis masyarakat serta memiliki potensi sebagai wisata lokal..

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif di mana metode penelitian yang dilakukan secara alamiah atau naturalistik karena penelitian ini sendiri dilakukan berdasarkan pengumpulan data secara alamiah, dengan menggunakan metode dan dilakukan oleh peneliti berdasar kepada masalah yang terdapat di lokasi penelitian.

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang mana pada penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran lengkap mengenai setting sosial dengan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau situasi tertentu yang dialami oleh masyarakat setempat.

C. Sumber Data

1. Data primer berupa data yang diperoleh melalui observasi langsung serta dari hasil wawancara dengan pihak yang dapat memberikan keterangan yang terkait dengan penelitian ini.
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen dan literatur serta bahan-bahan tertulis baik dari dalam maupun dari luar yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Dalam suatu penelitian haruslah menggunakan teknik pemilihan informan yang tepat agar dalam pengumpulan data lebih akurat. Dalam penelitian ini peneliti memilih teknik *accidental sampling / convenience* digunakan dengan mempertimbangkan aksesibilitas peneliti dengan informan dalam hal ini pemilihan informan dilakukan berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian serta keberadaannya di lokasi penelitian. Teknik pemilihan informan diatas dipilih peneliti agar data yang diperoleh lebih representatif terhadap permasalahan yang terkait penelitian ini.

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini, yakni :

1. Kepala Desa Lero
2. Ketua pengelola BUMDesa Maipi Lestari
3. Pengelola objek wisata Rumah Pohon
4. Pedagang

5. Masyarakat desa Lero

6. Pengunjung

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN
1.	Asbir	AS	Kepala Desa Lero
2.	Wahyuddin, M.Si	WH	Ketua BUMDes Maipi Lestari
3.	Afwan	AF	Pengelola Objek Wisata Rumah Pohon
4.	Anto	AN	Juru Parkir
5.	Isnawati	IS	Pedagang
6.	Devi	DV	Warga
7.	Reski	RE	Warga
8.	Pandi	PN	Pengunjung
9.	Puspita	PT	Pengunjung

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, baik itu data primer yang diperoleh dari kata-kata dan tindakan langsung para informan seta data sekunder berupa tulisan, media ataupun dokumen yang mendukung pernyataan informan serta dokumentasi-dokumentasi yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya

:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung gejala atau kondisi yang terjadi di lokasi penelitian

2. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi langsung berupa keterangan lisan yang disampaikan informan kepada peneliti berdasarkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti berkaitan dengan permasalahan penelitian

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa arsip-arsip maupun dokumen resmi dalam bentuk statistik yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian, selanjutnya dilakukan analisis data, yakni model analisis interaktif dengan beberapa komponen sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap informan serta dengan melihat literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data yang bertujuan untuk melihat mana fokus dari data yang ditemukan agar lebih memperjelas hasil dari penelitian.

3. Sajian Data

Setelah mereduksi data kemudian dilakukan penyajian data yang mana menampilkan simpulan informasi dari penelitian.

4. Pemeriksaan Kesimpulan

Hasil dari penelitian harus berdasarkan pada informasi yang ditemukan dilapang yang bersifat kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Keabsahan Data

Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dari sumber yang telah ada. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012:370) ada tiga macam triangulasi, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Melakukan perbandingan hasil pengamatan dengan cara pengecekan silang melalui sumber yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik

Melakukan pengujian keabsahan data dengan melakukan pengecekan silang terhadap informan yang sama namun dengan teknik pengumpulan data yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Tingkat kredibilitas suatu data juga dipengaruhi oleh waktu, maka dari itu dilakukan pengumpulan data dengan teknik yang sama namun dalam situasi dan kondisi yang berbeda.

Kecamatan Masamba merupakan salah satu kecamatan yang terletak di bagian tengah Kabupaten Luwu Utara dengan luas wilayah 1.068,85 Km². Dengan posisi yang strategis menjadikan Kecamatan Masamba ideal dijadikan sebagai ibu kota Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Masamba sendiri berbatasan dengan Kecamatan Rampi di bagian utara, di bagian timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Mappideceng sedangkan masing-masing di bagian selatan dan barat berbatasan dengan Kecamatan Malangke dan Baebunta. Kecamatan Masamba berada pada jalur Trans-Sulawesi yang mana menghubungkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah (poros Poso - Palopo) dan Sulawesi Tenggara (poros Kolaka – Palopo).

Wilayah administrasi Kecamatan Masamba memiliki 4 kelurahan, 15 desa serta 2 unit pemukiman Transmigrasi. Masamba memiliki wilayah topografi yang beragam, sebagian besar pada wilayah topografi yang datar dan sebagiannya dengan topografi berbukit-bukit dengan keseluruhan wilayah berada pada ketinggian antara 50 sampai 300 meter di atas laut.

2. Kondisi Pariwisata Di Desa Lero

Desa Lero merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang berdasarkan data monografi secara administrasi Desa Lero berbatasan langsung dengan wilayah sekitarnya yaitu meliputi :

- Sebelah utara : Kecamatan Rampi
- Sebelah selatan : Desa Baloli , Kecamatan Masamba
- Sebelah timur : Desa Sumilin, Kecamatan Masamba

- Sebelah barat : Desa Meli, Kecamatan Masamba

Berdasarkan klasifikasi administratif wilayah Desa Lero berada pada 120.195675 LS/LU -2.363246 BT/BB. Desa Lero berada pada ketinggian 225 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah sekitar 23.425 hektar. Perjalanan menuju Desa Lero dari pusat Kota Masamba ±10 km. Sepanjang perjalanan menuju Desa Lero disuguhkan dengan pemandangan alam dan persawahan. Desa Lero merupakan salah satu daerah dengan potensi wisata alam melimpah, memiliki wilayah yang berada di daerah pegunungan membuat Desa Lero memiliki pariwisata alam yang menarik, daerahnya yang agraris menjadi potensi pertanian yang unggul. Berikut ini beberapa potensi pariwisata di Desa Lero yakni :

a. Wisata alam Permandian Maipi

Wisata alam permandian Maipi memiliki kondisi alam yang sangat alami, eksotik dan sejuk, kondisi perairan yang segar bersumber dari pegunungan membuat objek wisata ini banyak di jadikan masyarakat sebagai alternatif rekreasi keluarga.

b. Air terjun Sarambu Alla

Air terjun Sarambu Alla memiliki tingkat kemiringan yang mencapai 85° dengan tinggi terjuan air mencapai 6 meter dengan kondisi air yang jernih. Disekitar objek wisata ini juga menawarkan panorama alam yang sangat menarik serta alami dengan rimbunan hutan lindung yang ada disekitarnya serta tebing-tebing batu yang terjal.

c. Rumah Pohon

Rumah Pohon merupakan objek wisata unik dimana bangunanya berdiri disebuah pohon dengan bahan baku bangunan yang terbuat dari limbah daur ulang yang dibuat secara kreatif oleh pemuda Desa Lero. Tidak hanya bangunan yang unik objek wisata Rumah Pohon juga menawarkan keindahan alam dengan aliran sungai yang mengalir dibawahnya.

d. Agrowisata

Desa Lero yang berada pada wilayah pengunungan membuat daerah ini menjadi kawasan agraris, sebagian besar masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani hasil pertanian masyarakat berupa padi dan buah-buahan. Jika masyarakat setempat mampu mengelola pariwisatanya maka dapat dikembangkan sebagai agrowisata yang potensial.

3. Keadaan Masyarakat Desa Lero

Masyarakat Desa Lero merupakan masyarakat yang menjalin hubungan sosial dengan intim dan saling berinteraksi. Sikap kekeluargaan yang dimiliki masyarakat Desa Lero dibuktikan dengan hal kecil seperti selalu bertegur sapa serta sikap ramah terhadap wisatawan menjadi salah satu daya tarik wisatawan di Desa Lero.

Desa Lero memiliki 3 dusun dengan jumlah penduduk sekitar 860 penduduk. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Lero :

DUSUN	KEADAAN PENDUDUK		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Lero	153	150	303
Maipi	326	169	326
Mappatuju	123	106	229
JUMLAH	432	427	860

(Sumber Data : Monografi Desa Lero Tahun 2017)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas jumlah penduduk Desa Lero sebesar 860 jiwa dengan dengan persentasi jenis kelamin laki-laki sebesar 50,34% sedangkan persentase jumlah penduduk perempuan sebesar 49,66% yang terbagi di tiga dusun yakni Dusun Lero, Dusun Maipi dan Dusun Mappatuju.

Seperti masyarakat pada umumnya, masyarakat Desa Lero yang berada pada wilayah agraris sehingga mayoritas masyarakat Desa Lero adalah petani baik itu petani padi, buah-buahan maupun sayuran. Berikut jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan :

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Petani	332	38,60%
2.	Karyawan	28	3,56%
3.	Wiraswasta	56	6,51%
4.	Buruh	5	0,66%
5.	Ibu Rumah Tangga	194	22,59%
7.	Pelajar	177	20,58%
8.	Tidak Bekerja	68	7,9%
JUMLAH		860	100%

(Sumber Data : Monografi Desa Lero Tahun 2017)

Dilihat dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Lero adalah dengan bertani, dilihat juga dari jenis pekerjaan masyarakat Desa Lero memiliki ekonomi menengah, yang mana diketahui ekonomi masyarakat mengandalkan hasil panen.

Dalam permasalahan pendidikan masyarakat Desa Lero dilihat dari data yang ada sebagian besar masyarakat kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan itu sendiri yang mana pendidikan sebagai suatu aspek yang penting dalam pengembangan individu yang dijadikan sebagai penunjang taraf kehidupan menuju yang lebih baik. Dalam hal ini, rendahnya tingkat pendidikan dalam masyarakat Desa Lero tidak sedikit dilatarbelakangi oleh perekonomian masyarakat. Tidak sedikit pula masyarakat Desa Lero yang mengenyam pendidikan tingkat sekolah menengah bahkan perguruan tinggi. Meskipun mayoritas masyarakat Desa Lero yang memiliki

pendidikan yang tidak cukup tinggi namun hal itu tidak mengurangi antusiasme masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di daerah mereka guna menciptakan desa wisata mandiri. Berikut data tingkat pendidikan masyarakat Desa Lero dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lero

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Taman Kanak-kanak	13	2,5%
2.	Sekolah Dasar	354	67,55%
3.	Sekolah Menengah Pertama	64	12,21%
4.	Sekolah Menengah Atas	72	13,74%
5.	Akasemi D1- D3	5	0,95%
6.	Strata 1	16	3,05%
JUMLAH		524	100%

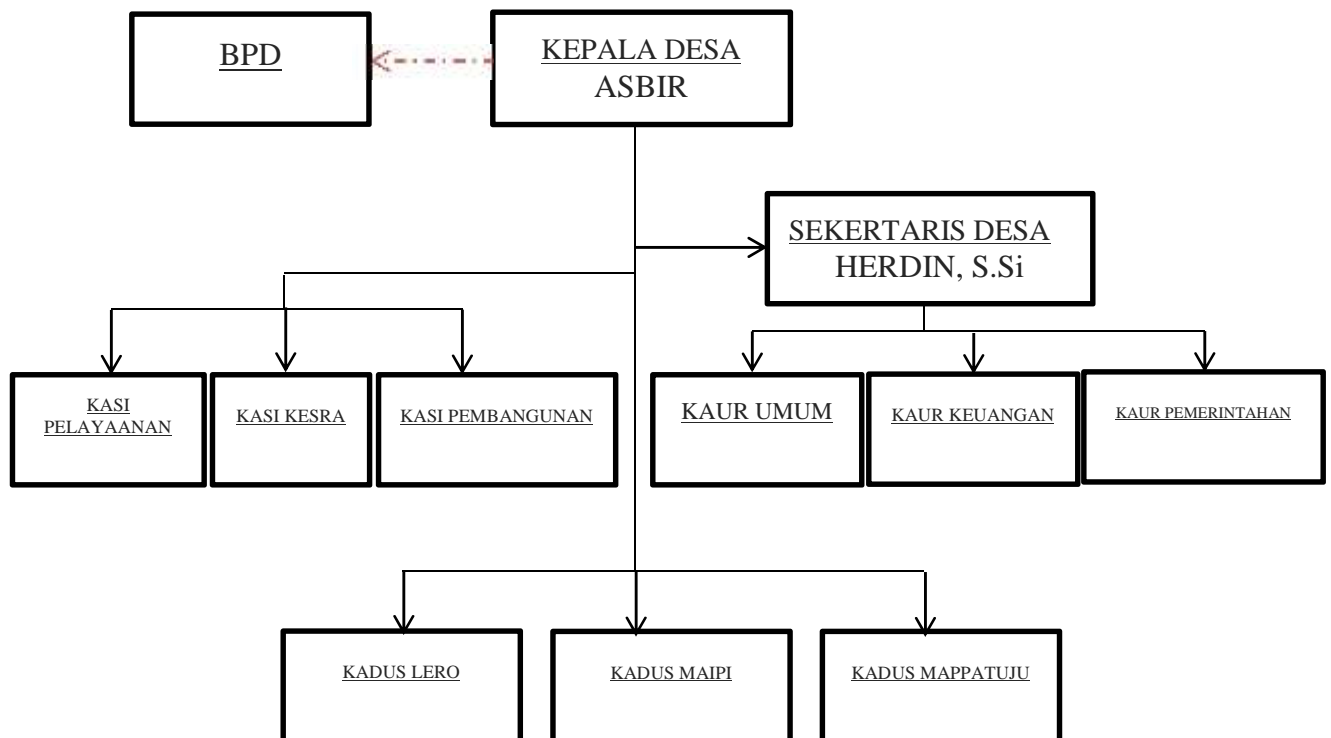
(Sumber Data : Monografi Desa Lero Tahun 2017)

Dilihat dari tabel 4.3 mayoritas tingkat pendidikan Desa Lero hanya sebatas lulusan SD yang dilatarbelakangi oleh berbagai hal salah satunya masalah perekonomian. Namun, tidak sedikit masyarakat Desa Lero memiliki pola pikir pendidikan sebagai penunjang kualitas hidup individu. Dapat dideskripsikan pula dari tabel 4.3 setiap masyarakat memiliki pengetahuan dan pola pikir berbeda berdasarkan tingkat pendidikan. Tidak sebatas pendidikan formal saja, setiap individu masyarakat

dapat memberi kontribusinya terhadap pengelolaan pariwisata di Desa Lero guna mencapai desa wisata yang diharapkan oleh masyarakat Desa Lero.

4. Struktur Organisasi Desa Lero

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lero



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lero
(sumber data monografi Desa Lero tahun 2017)

Sumber daya manusia (SDM) sangatlah penting dalam menunjang kinerja organisasi. Dalam pelaksanaan suatu program tentu saja diperlukan pelaksana guna mendukung terlaksananya program dengan baik. Oleh karena itu, ketersediaan

pelaksana yang cukup serta berkompetensi dalam mendorong keberhasilan suatu program sangat diperlukan. Untuk mengetahui keadaan sumber daya aparatur pada pemerintahan Desa Lero berdasarkan jenis kelamin dan status pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.4 Perangkat Desa Lero

	JENIS KELAMIN		STATUS PENDIDIKAN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SLTP	SLTA	S1
JUMLAH	7	6	-	12	1
TOTAL	13		13		

(Sumber Data : Monografi Desa Lero Tahun 2017)

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari jumlah 13 orang pegawai terdiri dari 7 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki ditunjukkan dengan persentase 60 % dan 6 orang pegawai berjenis kelamin perempuan dengan persentase 40%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan pegawai laki-laki dan pegawai perempuan tidak seimbang dengan pegawai laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu keadaan sumber daya aparatur pada Kantor Desa Lero Tingkat pendidikan berdasarkan tabel 4.4 pendidikan pegawai pada Kantor Desa Lero sangat berpotensi untuk memiliki pengetahuan dan sikap profesional yang tinggi untuk mengembangkan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pengetahuan dan keahlian untuk mengisi formasi jabatan dalam rangka pelaksanaan administrasi desa sebagai mana yang dilihat dari tabel yang di atas dapat dilihat mayoritas aparat Desa Lero berpendidikan

SLTA, dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Lero, hanya sekretaris desa yang berlatarbelakang Strata 1.

5. Uraian Tugas Pokok Aparat Desa Lero

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh aparat desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Kepala Desa

Tugas pokok :

Kepala desa diangkat melalui proses demokrasi, memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa bersama dengan aparat desa serta melakukan pemberdayaan desa berdasarkan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberdayakan masyarakat serta menjalin kerjasama dan koordinasi bersama dengan pemangku kepentingan yang ada di desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tugas pokok :

Lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang mana anggotanya merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan wilayah yang diwakilinya, BPD melakukan pembahasan rencana kerja desa bersama

dengan kepala desa serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala desa.

c. Sekertaris

Tugas pokok :

Merupakan perangkat desa yang mana membantu kepala desa dalam pengelolaan administrasi desa dan ikut serta dalam penyusunan peraturan desa serta mempersiapkan bahan dalam keberhasilan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

d. Pelaksana Teknis Desa

Tugas pokok :

- 1) Kepala Urusan Pemerintah, bertugas membantu kepala desa dalam urusan administrasi kependudukan dan pertanahan, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa serta mempersiapkan penyusunan kebijakan penataan dan produk hukum desa.
- 2) Kepala Urusan Pembangunan, bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat, administrasi pembangunan serta usulan penyelenggaraan bantuan masyarakat desa.
- 3) Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat, bertugas dalam membantu kepala desa menyusun kebijakan program keagamaan masyarakat, pemberdayaan serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

4) Kepala Urusan Keuangan, membantu sekertaris desa dalam pengelolaan keuangan desa, penyusunan APB Desa serta laporan keuangan desa.

5) Kepala Urusan Umum, membantu sekertaris desa dalam pengelolaan administrasi umum, kearsipan inventaris kekayaan desa serta tata usaha.

e. Kepala Dusun

Tugas pokok:

Sebagai perpanjangan kepala desa terhadap masyarakat dalam membatu kepala desa dalam melaksanakan tugas dalam wilayah kerja yang telah ditentukan.

6. Deskripsi Objek Wisata di Desa Lero

Desa Lero merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang memiliki potensi desa wisata yang besar, beberapa objek wisata yang ada di Desa Lero berbasis masyarakat yang mana tidak ada ikut andil pemerintah kabupaten dalam pengelolaannya. Berikut objek wisata berbasis masyarakat yang ada di Desa Lero :

a. Wisata alam Permandian Maipi

Wisata alam permandian Maipi memiliki kondisi alam yang sangat alami, eksotik dan sejuk, kondisi perairan yang segar bersumber dari pegunungan membuat objek wisata ini banyak di jadikan masarakat sebagai alternatif rekreasi

keluarga. Dilengkapi berbagai fasilitas berupa gazebo yang dapat digunakan pengunjung sebagai tempat beristirahat serta jembatan pelangi warna-warni yang menarik perhatian pengunjung dengan menjadikannya spot fotografi yang menarik bagi kaum pemuda.

b. Air terjun Sarambu Alla

Air terjun Sarambu Alla memiliki tingkat kemiringan yang mencapai 85° dengan tinggi terjuan air mencapai 6 meter dengan kondisi air yang jernih. Disekitar objek wisata ini juga menawarkan panorama alam yang sangat menarik serta alami dengan rimbunan hutan lindung yang ada disekitarnya serta tebing-tebing batu yang terjal.

c. Rumah Pohon

Rumah Pohon merupakan objek wisata unik dimana bangunannya berdiri disebuah pohon dengan bahan baku bangunan yang terbuat dari limbah daur ulang yang dibuat secara kreatif oleh pemuda Desa Lero. Tidak hanya bangunan yang unik objek wisata Rumah Pohon juga menawarkan keindahan alam dengan aliran sungai yang mengalir dibawahnya.

e. Agrowisata

Desa Lero yang berada pada wilayah pegunungan membuat daerah ini menjadi kawasan agraris, sebagian besar masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani hasil pertanian masyarakat berupa padi dan buah-buahan. Jika masyarakat setempat mampu mengelola pariwisatanya maka dapat dikembangkan sebagai agrowisata yang potensial.

Objek wisata diatas meski tergolong baru namun dapat menarik banyak perhatian pengunjung lokal maupun pengunjung yang berasal dari luar daerah. Kepariwisataan yang ada di Desa Lero dikelola oleh seluruh masyarakat yang masing-masing objek dinaungi oleh beberapa komunitas pemuda dan BUMDes yang tergabung dalam BUMDes Maipi Lestari. Berikut data pengunjug di objek wisata yang ada di Desa Lero pertahunnya :

Tabel 4.5 Jumlah Pengunjung Objek Wisata Di Desa Lero

NO.	OBJEK WISATA	TAHUN	
		2016	2017
1.	Wisata alam permandian maipi	5.500	5.796
2.	Rumah pohon	3.480	3.588
3.	Air terjun sarambu alla	3.480	3.575

(Sumber : Data Pengunjung Pertanggal 22 Oktober 2017)

Berdasarkan tabel data tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengunjung tiap tahunnya. Untuk objek wisata permandian maipi sendiri jumlah pengunjungnya lebih dari 5000 pengunjung. Meskipun objek wisata ini baru dibuka pada 2016 namun dapat menarik perhatian pengunjung dan diharapkan dalam pengembangan pihak pengelola dapat meningkatkan kualitas pengunjung per tahunnya.

Keberadaan objek wisata yang berada di Desa Lero sendiri memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan asli Desa Lero sendiri apabila dikelola dengan optimal.berdasarkan data realisasi pendapatan asli Desa Lero periode tahun 2016-2017 retribusi yang diperoleh dari sektor pariwisata sebagai berikut :

Tabel 4.6 Data Realisasi Pendapatan Asli Desa Lero Tahun 2016-2017 Retribusi dari Sektor Pariwisata

NO.	BULAN	2016	2017
1.	Januari	-	Rp 4.000.000,
2.	Februari	-	Rp 3.050.000,
3	Maret	-	Rp 3.420.000,
4.	April	Rp 5.740.000,	Rp 2.970.000,
5.	Mei	Rp 4.790.000,	Rp 3.740.000,
6.	Juni	Rp 3.260.000,	Rp 4.040.000,
7.	Juli	Rp 2.150.000,	Rp 2.280.000,
8.	Agustus	Rp 4.020.000,	Rp 4.140.000,
9.	September	Rp 2. 410.000,	Rp 3.600.000,
10.	Oktober	Rp 1.850.000,	Rp 4.340.000,
11.	November	Rp 2.990.000,	Rp 3.820.000,
12.	Desember	Rp 2.570.000,	Rp 4.840.000,
TOTAL		Rp 29.780.000	Rp 39.900.000,

(Sumber : Data Realisasi Pendapatan Asli Desa Lero Tahun 2016-2017)

Berdasarkan dari data tersebut menunjukkan adanya peningkatan pendapatan asli Desa Lero dari sektor pariwisata pada tahun 2017. Total pendapatan yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari pengelolaan objek wisata yang ada di Desa Lero, dimana tarif retribusi tersebut terbagi dalam tarif perorangan untuk Dewasa Rp. 10.000 dan anak-anak Rp 5000 dan untuk parkir kendaraan roda empat sebesar Rp 5000 dan roda dua Rp 2000 serta retribusi dari penyewaan prasarana dan perlengkapan pendukung kegiatan pariwisata. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti objek wisata yang ada di Desa Lero ini lebih ramai dikunjungi di hari Sabtu dan Minggu serta hari Libur. Pendapatan di hari tersebut biasanya bisa mencapai Rp 1.500.000 per hari dan untuk hari biasa di sekitaran Rp 200.000 – 250.000 per hari.

Kepariwisataan Desa Lero sendiri memiliki tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan serta membangun desa wisata dengan kemandirian masyarakat. Tidak hanya itu dengan adanya kepariwisataan di Desa Lero sendiri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Visi kepariwisataan Desa Lero sendiri yakni meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa wisata. Dalam mewujudkan visi tersebut dan BUMDes Maipi Lestari melakukan misi sebagai berikut :

- 1) Menciptakan kepariwisataan berbasis masyarakat serta masyarakat mandiri dan mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan dalam pengembangan kepariwisataan
- 2) Memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam meningkatkan kepariwisataan dengan memerhatikan kelestarian dan ekosistem alam

- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelastarian alam
- 4) Meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam hal pengetahuan masyarakat dalam sektor wisata.

Dilihat dari misi-misi tersebut pengelolaan kepariwisataan berbasis masyarakat di Desa Lero merupakan kegiatan-kegiatan pengembangan di Desa Lero yang tidak lain bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Hasil Penelitian Pengelolaan Kepariwisataan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Masamba

Pembahasan mengenai tata kelola kepariwisataan berbasis masyarakat di kecamatan Masamba ini merupakan hasil dari fakta dan data yang ada di lapangan. Disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yakni dari teori Terry (Terry dan Rue, 2008 : 2) yang mana dalam teori tersebut memberikan komponen-komponen dalam melakukan pengelolaan dari sektor kepariwisataan.

Pengelolaan kepariwisataan berbasis masyarakat yang ada di Kecamatan Masamba khususnya di desa Lero ini dikelola langsung oleh komunitas pemuda dan BUMDes Maipi Lestari yang dibentuk oleh pemerintah Desa Lero. Penelitian tentang tata kelola kepariwisataan berbasis masyarakat ini menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen oleh Terry (1958) yang dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga tahap pengendalian yang merupakan komponen penting yang harus dilakukan pihak terkait dalam pengelolaan

kepariwisataan berbasis masyarakat yang ada di Desa Lero. Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dideskripsikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang akan disesuaikan dengan teori fungsi manajemen Terry.

1. Perencanaan

Pengelolaan pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berbasis kepada masyarakat ataupun komunitas dengan sumber daya manusia dan keunikan lokal baik itu fisik maupun nonfisik sebagai faktor utama dalam penggerak suatu pariwisata. Secara umum perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan, pembuatan strategi dalam pencapaian tujuan serta pengembangan rencana kerja suatu organisasi.

a. Permandian Alam Maipi

Tahap perencanaan dalam proses pengelolaan yaitu proses persiapan secara sistematis dalam melaksanakan suatu kegiatan yang diawali dengan proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, kapan pelaksanaannya dan dimana pelaksanaannya.

Dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Kecamatan Masamba khususnya di Desa Lero dalam proses perencanaannya dilakukan berdasarkan rencana kerja pemerintah Desa Lero yang seperti diungkapkan oleh kepala Desa Lero, mengatakan bahwa :

“Pertama, pembentukan awal objek wisata ini menggunakan anggaran dana desa, setelah berjalan kegiatan wisatanya lalu kita serahkan kepada BUMDes sebagai pengelola objek wisatanya”.(Wawancara bapak AS, Sabtu 21 Juli 2018)

Lanjut informan menjelaskan bahwa :

“pembangunan wisata permandian alam Maipi ini juga untuk menciptakan desa wisata mandiri yang ada di Kecamatan masamba” (Wawancara AS, Sabtu 21 Juli 2018)

Rencana kerja yang dimaksudkan disini adalah peraturan Desa Lero No 15 tahun 2016 tentang pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa. Pembentukan BUMDes Maipi Lestari dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa Lero dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Bertujuan dalam pemberdayaan masyarakat, mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang mandiri serta menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran yang ada di Desa Lero.

Namun dalam hal membuat perencanaan tidaklah selalu berjalan lancar, begitupun dengan pembangunan pariwisata di Desa Lero. Terdapat permasalahan lahan yang dialami pihak pengelola dalam pembangunan objek wisata, seperti halnya yang disampaikan dalam wawancara AS berikut :

“kami terkendala di lahan, karena lahan adalah milik warga jadi akan susah untuk membangun” (Wawancara AS, Sabtu 21 Juli 2018)

Seperti hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang dialami dalam proses pembangunan objek wisata berupa permasalahan lahan objek wisata yang notabene lahan milik warga sehingga dibutuhkan negosiasi antara pihak pengelola dan masyarakat yang bersangkutan, seperti penuturan lanjut dari AS berikut :

“Iya, kita melakukan negosiasi bersama warga untuk penggunaan lahannya” (Wawancara AS, Sabtu 21 Juli 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas bahwa harus adanya negosiasi antara pihak pengelola dengan masyarakat yang bersangkutan dalam pembangunan objek wisata sehingga dampak yang dihasilkan dari pengelolaan objek wisata sendiri tidak hanya dinikmati beberapa orang saja namun dapat memberikan manfaat terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Pengembangan dalam kepariwisataan merupakan hal yang penting demi keberlanjutan suatu objek pariwisata sehingga dibutuhkan perencanaan lanjut dalam meningkatkan kuantitas kunjungan wisatawan yang datang ke Desa Lero. Dari pihak pengelola sendiri menyiapkan beberapa rancangan program-program yang dapat meningkatkan kuantitas pengunjung seperti hasil wawancara WH selaku ketua BUMDes Maipi Lestari sebagai berikut :

“Untuk menarik perhatian pengunjung kami selaku pengelola membangun jembatan pelangi di atas permandian, mengadakan gazebo sebagai tempat peristirahatan pengunjung dan manambah prasarana untuk memfasilitasi kegiatan rafting yang ada di permandian maipi”. (Wawancara WH, Sabtu 21 Juli 2018)

Pemaparan kutipan wawancara diatas menunjukkan adanya beberapa rancangan program dalam pengelolaan pariwisata untuk wisata alam yang lebih menarik pengunjung untuk datang ke objek wisata yang ada di Desa Lero.

b. Air Terjun Sarambu Alla

Sejalan dengan rencana pengembangan objek wisata yang ada di Desa Lero salah satunya air terjun Sarambu Alla, Kepala Desa Lero juga menyampaikan adanya rencana pengembangan pariwisata Desa Lero kedepannya dengan mengajak kerjasama pemerintah kabupaten, bahwa:

“program kedepannya kita berencana melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pembangunan jalan menuju objek wisata Sarambu Alla”. (Wawancara AS, Sabtu 21 Juli 2018)

Seperti yang disampaikan dari kutipan wawancara diatas, menunjukkan adanya usaha pengembangan pariwisata dengan merangkul pemerintah kabupaten dalam hal penyediaan aksesibilitas yang diketahui bahwa aksesibilitas untuk sampai di beberapa titik objek wisata yang ada di Desa Lero masih belum memadai salah satunya aksesibilitas menuju air terjun Sarambu Alla.

Untuk tarif wisata di objek wisata permandian Maipi dan air terjun Sarambu Alla, pihak pengelola memberikan harga terhadap pengunjung objek wisata seperti yang dikatakan oleh WH sebagai berikut :

“ya kita ada kasi harga untuk pengunjung karna kita juga menggaji petugas yang kerja dimana mau dapat dana kalau kita tidak kasi tarif,

untuk parkir perkendaraannya roda dua 2000 rupiah dan untuk roda empat 5000” (wawancara WH Sabtu 21 Juli 2018)

Wawancara tersebut menyatakan adanya tarif yang ditentukan oleh pihak pengelola yang dikenakan untuk pengunjung. Tarif tersebut digunakan pengelola untuk pembiayaan operasional baik itu menggaji petugas serta biaya pemeliharaan objek wisata.

c. Rumah Pohon

BUMDes Maipi Lestari hanya manaungi beberapa objek wisata diantaranya wisata alam permandian Maipi dan air terjun Sarambu Alla, sedangkan untuk objek wisata Rumah Pohon dikelola sendiri oleh komunitas pemuda, seperti yang dikatakan oleh Saudara AF selaku pengelola objek wisata Rumah Pohon sebagai berikut :

“untuk dana awal pembangunan Rumah Pohon kami menggunakan swadaya masyarakat serta untuk bangunan kami gunakan limbah daur ulang yang kami kumpulkan dari masyarakat.” (wawancara AF, Jumat 20 Juli 2018)

Seperti hasil wawancara diatas menunjukkan adanya perbedaan penganggaran antara objek wisata satu dengan yang lain. Komunitas pemuda dalam perencanaan pembentukan objek wisata Rumah Pohon pada awalnya yang hanya memanfaatkan swadaya masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan oleh AF dalam perencanaan pembangunan objek wisata Rumah Pohon, sebagai berikut :

“Awalnya pembangunan Rumah Pohon hanya sebagai aksi sosial sehingga dibangun rumah edukasi untuk anak-anak Desa Lero, namun respon

masyarakat yang antusias dan banyak menarik perhatian pengunjung sehingga dikembangkan sebagai salah satu objek wisata yang ada di Desa Lero.” (Wawancara AF, Jumat 20 Juli 2018)

Ditambah penuturan AF selaku pengelola objek wisata Rumah Pohon, dalam proses pembangunan yang awalnya hanya sekedar rumah edukasi namun melihat potensi pariwisata yang ada sehingga dijadikan sebagai salah satu objek wisata yang berbasis masyarakat.

Dalam pengelolaan Rumah Pohon pihak pengelola memberikat tarif untuk pengunjung seperti hasil wawancara berikut :

“di Rumah Pohon kita cuma pungut biaya pengunjung per kepala 5000 rupiah itu untuk biaya operasional objek wisata seperti perbaikan dan pengembangannya juga” (Wawancara SA, Jumat 20 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan adanya tarif yang ditentukan oleh pihak pengelola yang dikenakan untuk pengunjung. Tarif tersebut digunakan pengelola untuk pembiayaan operasional baik itu mengaji petugas serta biaya pemeliharaan objek wisata. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan peneliti di lokasi bahwa di objek wisata Rumah Pohon memberikan tarif terhadap pengunjung untuk biaya masuk.

Pengelolaan dengan melakukan perencanaan bersama dalam menciptakan pariwisata alam yang lebih baik dari sebelumnya tanpa merusak tatanan ekosistem alam yang terbentuk sejak dahulu. Dengan adanya rancangan-rancangan program baru mengimplikasikan bahwa masyarakat Desa Lero sangat antusias dalam

pengembangan wisata alam yang ada serta mendukung terciptanya desa wisata. Tindakan perencanaan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang rasional oleh para aktor dalam upaya pencapaian tujuan bersama.

2. Pengorganisasian

Kepariwisata berbasis masyarakat dijadikan sebagai peluang dan potensi besar dalam pengembangan kualitas hidup masyarakat. Peran organisasi dalam pengelolaan pariwisata sangatlah penting khususnya dalam pengelolaan objek wisata berbasis masyarakat di Desa Lero. Dalam proses pengelolaan objek wisata tidak luput dari adanya proses pengorganisasian dimana adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan teknis operasional dan teknis penunjang.

a. Permandian Alam Maipi dan Air Terjun Sarambu Alla

Dalam pengelolaan objek wisata yang ada di Desa Lero melibatkan masyarakat agar hasil yang diberikan dari pengelolaan pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. seperti kutipan wawancara dengan kepala Desa Lero berikut :

“kami melibatkan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata agar masyarakat dapat merasakan langsung dampak dari pariwisata yang ada.” (Wawancara AS, Sabtu 21 Juli 2018)

Uraian wawancara tersebut bahwa dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, masyarakat dapat merasakan secara langsung dampak

dari pariwisata dalam hal ini dapat membantu perekonomian masyarakat itu sendiri.

Untuk memberikan payung hukum bagi objek wisata yang ada di Desa Lero, pemerintah Desa Lero membentuk BUMDes yang nantinya sebagai kelompok pengelola objek wisata. Berikut kutipan wawancara dengan AS selaku kepala Desa Lero terkait pembentukan BUMDesa yang menaungi pengelolaan objek wisata Permandian Alam Maipi dan air terjun Sarambu Alla :

“Ya, agar pengelolaan lebih terorganisasi dengan baik kami membentuk BUMDes Maipi Lestari sebagai pengelola objek wisata permandian alam Maipi dan air terjun Sarambu Alla ini” (wawancara AS, Sabtu 21 Juli 2018)

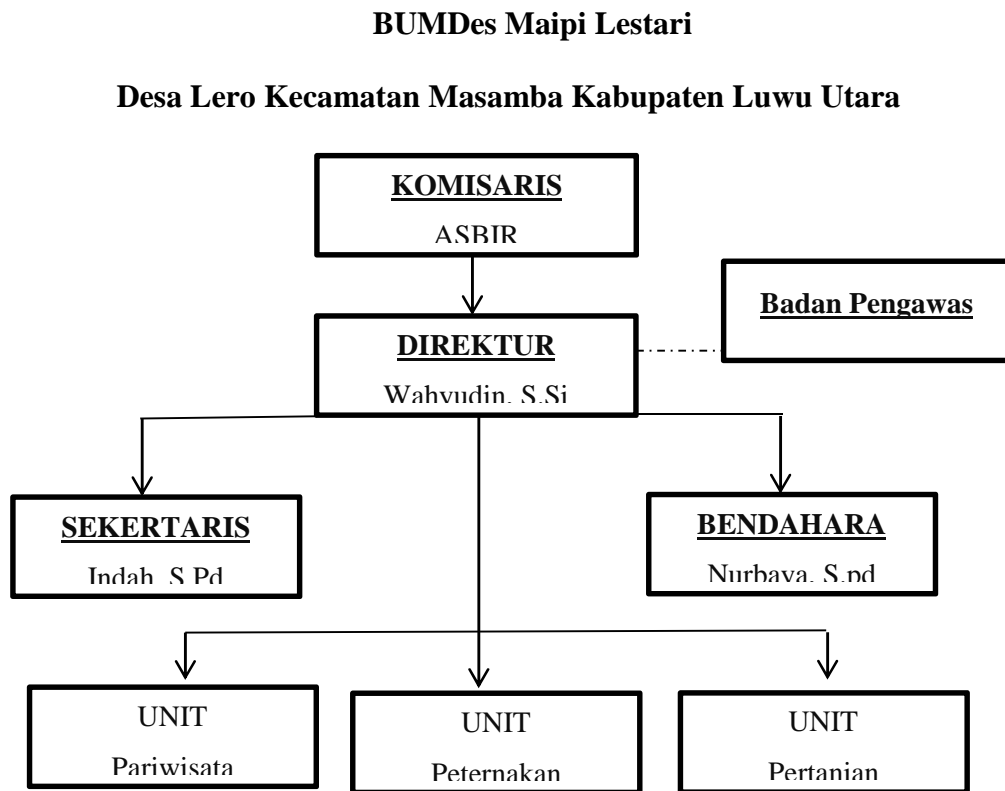
Berdasarkan hasil wawancara di atas, kepala desa dan warga Desa Lero membentuk BUMDes Maipi Lestari guna menjadikan objek wisata yang ada di Desa Lero terorganisasi dengan baik serta mempermudah dalam proses pengelolaannya. Hal ini berkaitan dengan pentingnya sebuah pengorganisasi dalam pengelolaan objek wisata seperti hasil wawancara dengan WH selaku Ketua BUMDes berikut :

“saya pikir pembentukan organisasi pengurus dalam hal ini BUMdes selaku pengelola permandian ini sangat penting untuk menghindari adanya saling klaim objek wisata sehingga hasilnya tidak dinikmati oleh beberapa orang saja” (wawancara WH, Sabtu 21 Juli 2018)

Seperti pemaparan hasil wawancara di atas, dibentuknya suatu kelompok pengelola sangatlah penting dalam menghindari adanya saling klaim antar

masyarakat yang memicu adanya pertengkaran dalam masyarakat. Hal ini tidak lain pula bertujuan agar hasil yang diperoleh dari pengelolaan objek wisata tidak hanya segelintir masyarakat yang merasakan dampaknya namun seluruh masyarakat dapat menikmati dampaknya.

Berikut struktur organisasi dari BUMDes Maipi Lestari selaku pengelola objek wisata permandian alam Maipi dan air terjun Sarambu Alla :



Gambar 4.3 Struktur Organisasi BUMDes Maipi Lestari
(sumber : Peraturan Desa Lero No. 15 Tahun 2016)

Bagan tersebut merupakan struktur organisasi BUMDes Maipi Lestari yang di bentuk oleh pemerintah Desa Lero sebagai kelompok organisasi pengelola pariwisata yang ada di Desa Lero, tidak hanya unit pariwisata saja namun BUMDes tersebut mengelola unit peternakan dan pertanian yang ada di Desa Lero, hal ini dikarenakan oleh adanya potensi agrowisata yang dapat membantu pengembangan potensi kepariwisataan yang ada di Desa Lero.

Kepariwisataan yang ada di Desa Lero merupakan pariwisata yang berbasis terhadap masyarakat sehingga pihak BUMDes melakukan koordinasi bersama masyarakat dalam pengelolaan objek wisata. Seperti hasil wawancara bersama WH berikut :

“ya, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan, kami melakukan koordinasi bersama masyarakat terkait pembagian tugas dalam pengelolaan, ada yang bertugas sebagai penjaga objek wisata, tukang bersih dan tukang parkirnya” (Wawancara WH, Sabtu 21 Juli 2018)

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak BUMDes sendiri melibatkan masyarakat dalam pengelolaan seperti memberikan tugas kepada masyarakat sebagai penjaga objek wisata, tukang bersih, dan tukang parkir yang merupakan tugas penting dalam proses pengelolaan objek wisata. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama AN selaku tukang parkir di objek wisata Permandian Maipi berikut :

“ya, saya diberi tugas jaga parkir disini kan lumayan untuk menambah penghasilan harian” (Wawancara AN, Minggu 22 Juli 2018)

Berdasarkan uraian wawancara tersebut menyatakan bahwa adanya pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan objek wisata di Desa Lero dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat sehingga masyarakat Desa Lero dapat terberdayakan dengan adanya objek wisata.

Berbeda dengan penuturan pengunjung mengenai keamanan di objek wisata pemandian Maipi di Desa Lero yang belum terorganisir dengan baik, seperti wawancara berikut :

“belum ada pengawasnya, aliran sungai disini kan deras takutnya ada pengunjung yang tenggelam ini kan tanggung jawab pengelola”
(Wawancara PN, Minggu 29 Juli 2018)

Sesuai hasil wawancara bersama pengunjung PN di atas menyatakan belum adanya petugas keamanan dari pihak pengelola sehingga objek wisata belum terasa aman bagi pengunjung. Diketahui bahwa untuk menghadirkan rasa aman bagi pengunjung adalah tanggung jawab pihak pengelola dalam mengelola objek wisata. Hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan peneliti di lokasi objek wisata Pemandian Alam Maipi belum ada petugas yang mengawasi keamanan pengunjung.

Target dikelolanya objek wisata permandian alam maipi dan air terjun Sarambu Alla agar meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Untuk mendukung

tercapainya target tersebut dalam pengelolaan objek wisata pihak pengelola memberikan pungutan bagi pengunjung seperti berikut :

Tabel 4.7 Jenis Dan Besaran Pungutan Objek Wisata Permandian Alam Maipi Dan Air Terjun Sarambu Alla

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF
1.	Parkiran kendaraan roda 4	Rp 5000
2.	Parkiran kendaraan roda 2	Rp 2000
3.	Sewa Gazebo	Rp 50.000
4.	Sewa baju pelampung	Rp 10.000
5.	Sewa baju pelampung ruber Tubbing	Rp 35.000
6.	Sewa ban pelampung	Rp 10.000

(sumber : Peraturan Desa Lero No 15 Tahun 2016)

Berdasarkan dari tabel 4.6 menunjukkan tarif pungutan untuk biaya kunjungan di objek wisata Permandian Alam Maipi dan air terjun Sarambu Alla yang dimana tarif tersebut berdasarkan Peraturan Desa Lero No 15 Tahun 2016 tentang BUMDes yang dibuat oleh pemerintah Desa Lero dan dijalankan oleh pihak pengelola objek wisata. Penentuan tarif tersebut dilakukan berdasarkan dari target yang ingin dicapai dalam pengelolaan objek wisata berbasis masyarakat.

Untuk mekanisme pembagian dari hasil pengelolaan objek wisata permandian alam maipi dan air terjun sarambu alla yang dikelola oleh BUMDes maipi lestari dilakukan berdasarkan Peraturan Desa Lero No 15 Tahun 2016 tentang BUMDes seperti wawancara kepala Desa Lero sebagai berikut :

“ untuk pembagian hasil kami lakukan berdasarkan dengan yang ditetapkan dimana 25% untuk pendapatan asli desa, honor pengelola sebesar 40%, pemupukan modal usaha sebesar 25%, biaya rapat 5% sama untuk komisaris sebesar 5%” (Wawancara AS, Sabtu 21 Juli 2018)

Uraian wawancara di atas menunjukkan adanya pembagian hasil pengelolaan objek wisata yang dilakukan berdasarkan ketetapan dalam Peraturan Desa Lero No 15 Tahun 2016 tentang pembentukan BUMDes dimana pembagiannya pendapatan asli desa sebesar 25%, honor pengelola sebesar 40%, pemupukkan modal usaha 25%, biaya rapat dan komisaris masing-masing sebesar 5%.

Dalam proses pengelolaan objek wisata, pihak pengelola memberikan penjelasan mengenai siklus pengelolaan keuangan dari pendapatan objek wisata seperti dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“untuk pengelolaan keuangan itu yang urus bendahara BUMDes dimana petugas di lokasi menyetor ke bendahara kemudian bendahara yang kelola uangnya dibagi per persennya berdasarkan yang ada di peraturan BUMDes” (Wawancara WH, Sabtu 21 Juli 2018)

Seperti hasil wawancara diatas, menjelaskan bagaimana alur keuangan dari pendapatan pengelolaan objek wisata. Dimana petugas di lokasi menyerahkan hasil kepada bendahara BUMDes yang selanjutnya dikelola berdasarkan peraturan dalam peraturan Desa Lero No. 15 tahun 2016 tentang pembentukan BUMDes.

Objek wisata Permandian Alam Maipi dan air terjun Sarambu Alla dikelola oleh BUMDes Maipi Lestari, apabila dikaitkan dengan pembagian hasil

pendapatan retribusi dengan jumlah pendapatan berdasarkan pada tabel 4.6 maka dalam hal ini total pendapatan belum mampu meningkatkan pengembangan objek wisata.

Dalam proses pengelolaan objek wisata kehadiran kelompok organisasi sangatlah penting karena meliputi tanggung jawab pengelola dalam melaksanakan proses pengelolaan kepariwisataan di Desa Lero masih mengabaikan tugas fungsional yang mana belum adanya petugas keamanan yang disediakan.

b. Rumah Pohon

Berbeda dengan objek wisata Permandian Alam Maipi dan air terjun Sarambu Alla, objek wisata Rumah Pohon tidak dikelola oleh BUMDes Maipi Lestari melainkan dikelola langsung oleh kelompok pemuda Desa Lero seperti penuturan pihak pengelola berikut :

“yang berperan dalam pengelolaan objek wisata Rumah Pohon adalah kelompok pemuda, berawal dari inisiatif pemuda dalam mengembangkan rumah pohon sebagai objek wisata” (Wawancara AF, jumat 20 juli 2018)

Diperkuat oleh pengurus rumah pohon :

“yang kelola itu kelompok pemuda, kami adakan piket untuk jaga disini ada juga yang tinggal di rumah pohon” (Wawancara SA, Jumat 20 Juli 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya inisiatif pemuda dalam mengelola objek wisata Rumah Pohon. Pemuda Desa Lero membentuk sebuah komunitas yang bertugas dalam pengelolaan objek wisata

Rumah Pohon. Meskipun pengelolaan Rumah Pohon dilakukan secara mandiri oleh komunitas tetapi dapat mampu mengembangkan objek wisata dengan baik.

Namun dalam pengelolaan rumah pohon, komunitas terkendala dalam hal sumber daya manusia seperti hasil wawancara AF sebagai berikut :

“karena hanya komunitas yang kelola kami masih kekurangan petugas, disini kami hanya berlima yang kelola jadi kita melakukan gantigantian melaksanakan tugas seperti membersihkan atau menjaga Rumah Pohon” (Wawancara AF, Jumat 20 Juli 2018)

Seperti hasil wawancara menurut pihak pengelola Rumah Pohon, masih terkendala dalam sumber daya manusia dimana masih kurangnya petugas yang bertugas dalam mengelola objek wisata Rumah Pohon. Seperti hasil pengamatan peneliti di objek wisata Rumah Pohon hanya ada petugas yang mengawasi objek wisata, pemungutan biaya masuk serta juru parkir. Dipertegas dengan wawancara AF berikut :

“di sini hanya ada petugas parkir, pemungut biaya masuk sama yang tinggal di Rumah Pohon sebagai penjaga, biasanya kami lakukan piket untuk melaksanakan tugas” (Wawancara AF, Jumat 20 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara tersebut, dalam pengelolaan objek wisata Rumah Pohon masih belum maksimal dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang kurang sehingga belum terorganisir dengan baik. Hal ini dapat memberikan efek yang kurang baik dalam pengelolaan seperti kurang terurusnya objek wisata sehingga proses pengembangan objek wisata belum berjalan dengan maksimal.

Tidak hanya sumber daya manusia yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan objek wisata, anggaran pengelolaan juga sama pentingnya dalam sebuah proses pengelolaan. Begitu halnya dengan pengelolaan objek wisata Rumah Pohon, agar dapat mewujudkan pengembangan yang baik untuk objek wisata pihak pengelola memberikan tarif kunjungan untuk pengunjung Rumah Pohon.

Untuk penentuan tarif kunjungan di Rumah Pohon pihak pengelola memberikan jawaban sebagai berikut :

“di Rumah Pohon kami hanya memberi tarif masuk untuk anak-anak sebesar Rp 5000 dan dewasa Rp 10.000 serta untuk parkir roda empat Rp 5000 dan roda dua Rp 2000. Hasil tersebut kami gunakan untuk honor pengelola sama untuk perbaikan rumah pohon” (Wawancara AF, Jumat 20 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan tarif pengelolaan objek wisata Rumah Pohon ditunjukkan untuk membiayai pengembangan objek wisata serta memberikan lapangan pekerjaan untuk petugas pengelola objek Rumah Pohon yang diharapkan dapat memberikan perubahan dalam pengelolaannya. Tidak hanya memberikan manfaat bagi pengelola saja, dari proses pengelolaan objek wisata juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dari hasil penelitian ini menemukan dampak-dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat selain dari memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, keberadaan objek wisata Rumah Pohon juga menjadikan lahan berdagang untuk

masyarakat sekitarnya, hal ini seperti hasil wawancara bersama pihak pengelola sebagai berikut :

“pada awalnya masyarakat kurang merespon dengan adanya Rumah Pohon ini, namun semakin lama masyarakat memanfaatkan dengan berjualan sekitar sini, selain itu kita juga merekrut anak muda kerja disini” (Wawancara AF, Jumat 20 Juli 2018)

Uraian wawancara tersebut menunjukkan awalnya masyarakat kurang merespon adanya objek wisata Rumah Pohon karena awalnya Rumah Pohon hanya dijadikan tempat berkumpul komunitas dan belajar bahasa Inggris, namun karena semakin ramai masyarakat mulai memanfaatkan dengan berjualan disekitar objek wisata.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan usaha yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses pengelolaan objek wisata, pelaksanaan dilakukan agar dalam proses pengelolaan tertuju pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini proses pelaksanaan meliputi proses pengorganisasian dan pengarahan. Telah dijelaskan sebelumnya bagaimana proses pengorganisasian yang terjadi dalam pengelolaan objek wisata yang ada di Desa Lero. Pengarahan sendiri dilakukan dengan mengingatkan petugas bagaimana dalam melakukan tugas-tugas operasional serta fungsinya.

a. Permandian Alam Maipi

Pengelolaan objek wisata yang ada di Desa Lero merupakan berbasis masyarakat sehingga banyak melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan menarik partisipasi masyarakat. seperti dikutip dari wawancara DV warga dusun Maipi sebagai berikut :

“ya, disini banyak masyarakat yang ikut membantu kerja di permandian terutama laki-laki mereka juga sering memberikan masukan bagaimana bagusnya untuk objek wisata” (Wawancara DV, Minggu 22 Juli 2018)

Uraian wawancara tersebut warga menyatakan adanya keterlibatan masyarakat dalam membantu proses pengelolaan objek pariwisata di Desa Lero, masyarakat juga memberikan pendapatnya tentang bagaimana pembangunan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas kunjungan di Desa Lero.

Sejalan dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata, masyarakat sekitar lokasi objek wisata merasakan dampak dari adanya objek wisata yakni dengan berjualan di lokasi objek wisata seperti hasil wawancara berikut :

“adanya pemandian ini membawa untung bagi penjual, kalau lagi ramai pegunjung biasanya dapat untung lumayan” (wawancara IS Minggu 22 Juli 2018)

Berdasarkan dari wawancara di atas diketahui dengan adanya objek wisata dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dengan usaha-usaha yang

berkaitan dengan perdagangan. Sama halnya yang disampaikan oleh warga berikut ini :

“ada perubahan dengan ekonomi masyarakat yang lebih baik, masyarakat dapat berjualan kan di sini banyak buah-buahan jadi masyarakat jualan buah-buahan dibeli sama pengunjung jadi tidak dibawa lagi ke kota untuk dijual” (Wawancara DV, Minggu 22 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan adanya peningkatan ekonomi masyarakat dengan berjualan di sekitar obek wisata. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai pelaku usaha-usaha pariwisata namun masyarakat juga berpartisipasi dalam urusan kebersihan objek wisata. Dikarenakan masyarakat Desa Lero menganut etos gotong royong sehingga masyarakat sekitar ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan objek wisata. Seperti yang hasil wawancara berikut :

“ya, partisipasi masyarakat sangat baik, setiap hari jumat kita adakan gotong royong membersihkan lingkungan desa di sekitaran objek wisata juga” (wawancara WH Sabtu 21 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan objek wisata yang dilakukan setiap hari jumat. Hal ini dilandaskan atas kesadaran masyarakat terhadap keikutsertaannya dalam pengembangan objek wisata seperti diungkapkan oleh RE berikut :

“iya, kita bantu-bantu bersihkan di sini karena banyak sampah kan tidak bagus kalau pemandian terlihat kotor nanti pengunjung tidak

mau datang mau bantu dana kita juga tidak bisa jadi sumbang tenaga saja” (wawancara RE Sabtu 21 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan objek wisata terkait dengan pembangunan objek wisata yang tidak selalu tentang bantuan dana dalam proses pembangunan.

Tidak hanya dalam menjaga lingkungan objek wisata, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam mempromosikan objek wisata yang ada di Desa Lero seperti yang diungkapkan DV berikut :

“kita buat hal-hal kreatif disini untuk menarik perhatian pengunjung seperti memanfaatkan limbah daur ulang nah itu kan unik menurut pengunjung jadi banyak yang post di media sosialnya” (wawancara DV Minggu 22 Juli 2018)

Lanjut dengan tanggapan pengunjung berikut :

“lihat di instagram ada objek wisata seperti ini di maipi, unik dijadikan spot fotografi jadi datang coba-coba kesini” (wawancara PT Minggu 29 Juli 2018)

Hasil wawancara di atas menggambarkan bagaimana usaha masyarakat agar membuat objek wisata terlihat menarik dengan memanfaatkan limbah daur ulang sehingga menarik perhatian pengunjung. Dengan memanfaatkan sosial media pengelola dapat mempromosikan objek wisata yang ada di Desa Lero.

b. Air Terjun Sarambu Alla

Tidak jauh berbeda dengan objek wisata Pemandian Alam Maipi, air terjun Sarambu Alla juga melibatkan partisipasi masyarakat seperti yang dikatakan WH selaku Ketua pengelola berikut :

“yang berperan semua tokoh masyarakat, kami ajak musyawarah bagaimana untuk pengembangan objek wisata kedepannya”
(Wawancara WH, Sabtu 21 Juli 2018)

Diperkuat oleh anggota pengelola Bapak IS:

“iya, saya juga ikut terlibat dalam pengelolaan meski itu cuma bantu-bantu tenaga, perbaiki jalan menuju air terjun karena licin, intinya agar ayo bersama bangun Desa Lero” (Wawancara IS, Sabtu 21 Juli 2018)

Berdasarkan uraian wawancara tersebut pengelolaan objek wisata melibatkan seluruh elemen masyarakat hal ini diperkuat oleh masyarakat menjadi anggota dalam memenuhi keamanan pengunjung dalam mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan baik.

c. Rumah Pohon

Pengelolaan objek wisata Rumah Pohon dalam proses pelaksanaan terlihat dari antusiasme kelompok pemuda dalam pengembangan objek wisata yang diwujudkan dalam kegiatan operasi bersih yang dilakukan setiap pekan agar kebersihan lingkungan objek wisata tetap terjaga seperti yang diungkapkan pengelola berikut :

“setiap pekan kami lakukan bersih-bersih lingkungan Rumah Pohon, masyarakat juga ikut berpartisipasi tidak hanya itu mereka juga bantu

membenahi bangunan Rumah Pohon” (Wawancara AF, Jumat 21 Juli 2108)

Diperkuat pula oleh wawancara warga berikut :

“kita juga ikut menyumbang meski bukan dalam bentuk uang tapi seperti barang-barang bekas yang dapat dimanfaatkan untuk di Rumah Pohon” (wawancara IR, Jumat 21 Juli 2018)

Uraian wawancara di atas menunjukkan antusiasme masyarakat dalam membantu mengelola objek wisata rumah pohon berupa sumbangsi tenaga dalam menjaga kebersihan lingkungan maupun sumbangsi materil yang berguna untuk pengembangan objek wisata. Tidak hanya itu, kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Rumah Pohon juga meliputi kegiatan promosi sebagaimana dijelaskan oleh pihak pengelola sebagai berikut :

“kami jalin relasi bersama dengan komunitas dari daerah lain kebetulan juga ada kenalan orang Jerman jadi kami biasa panggil untuk mengajar bahasa Inggris disini untuk mengajar anak-anak di Desa Lero, biasanya juga mereka mengundang teman-temannya kesini” (Wawancara AF, Jumat 21 Juli 2108)

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan adanya usaha pihak pengelola dalam mempromosikan objek wisata Rumah Pohon dengan menjalin hubungan dengan komunitas dari daerah lain sehingga mampu melakukan kegiata-kegiatan edukasi yang dapat memperkenalkan objek wisata Rumah Pohon lebih luas.

Kepariwisataan yang ada di Desa Lero merupakan pariwisata yang berbasis masyarakat sehingga masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengelolaan

dimulai dari perencanaan lalu ikut andil dalam melakukan tugas operasional, dalam pelaksanaan dan pengembangan objek wisata.

4. Pengendalian

Pengendalian yang meliputi proses pengawasan merupakan usaha dalam menilai guna mengetahui kenyataan yang telah diperoleh dengan membandingkan proses pelaksanaan program kerja dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian dibuatkan perbaikan dari hasil pemantauan yang telah dilakukan.

a. Permandian Alam Maipi dan Air Terjun Sarambu Alla

Dalam pengelolaan objek wisata di Desa Lero masyarakat ikut terlibat dalam proses evaluasi. Seperti dituturkan oleh pengelola berikut :

“ya kita melibatkan masyarakat setiap setahun 2 kali kita adakan musyawarah terkait pembangunan desa disitu juga masyarakat ikut memberikan masukan terkait pembangunan permandian “ (Wawancara WH, Sabtu 21 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan pengelola dan perangkat desa melakukan musyawarah setiap setahun 2 kali untuk membahas pembangunan desa tidak lupa juga dalam musyawarah masyarakat menyampaikan permasalahan terkait pembangunan objek wisata.

Dalam proses pengawasan, pihak pengelola harus memperhatikan segala dimensi yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata baik itu sarana dan prasarana, keselamatan, serta pelayanan terhadap pengunjung.

Dalam tata kelola objek wisata, lahan parkir sangatlah krusial bagi pengunjung, sehingga pihak pengelola harus siap menyediakan lahan parkir demi kenyamanan pengunjung seperti dikatakan oleh pengunjung berikut :

“masih susah padahal kita bayar, lahan parkirnya sempit jadi kalau banyak kendaraan susah keluar” (wawancara PN Minggu 29 Juli 2108)

Sama seperti yang dilontarkan petugas parkir di permandian berikut :

“lahan yang ada hanya seperti ini karena berdekatan dengan rumah warga kadang ada warga yang tidak ingin pekarangannya dijadikan tempat parkir sedangkan parkir di dalam sempit” (Wawancara AN Minggu 22 Juli 2018)

Sesuai dengan apa yang ditunjukkan hasil wawancara diatas menunjukkan adanya permasalahan lahan parkir yang ada di objek permandian, dikarenakan berdekatan dengan pemukiman masyarakat sehingga lahan parkir yang ada relatif sempit. Sehingga dibutuhkan kesadaran bagi pihak pengelola untuk menyediakan lahan parkir di sekitar objek wisata.

Tidak hanya permasalahan lahan parkir, aksesibilitas juga menjadi permasalahan bagi pengunjung untuk mencapai objek wisata seperti yang dikatakan oleh pengunjung berikut :

“lumayan jauh dari pusat kota jalannya juga masih ada yang belum diperbaiki” (Wawancara HS Minggu 29 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan akses yang jauh dan masih ada jalan yang belum dibenahi sehingga menyulitkan pengunjung untuk mencapai

objek wisata. Hal ini membuat pihak pengelola berharap adanya bantuan perbaikan jalan dari pemerintah daerah seperti yang dituturkan oleh kepala desa sebagai berikut :

“masih ada sedikit yang belum diperbaiki jadi kita berharap kepada pemerintah daerah untuk segera memperbaiki toh mereka juga yang menggunakan kalau membawa keluarganya rekreasi di sini” (Wawancara AS, Sabtu 21 Juli 2018)

Hal lain yang juga harus diperhatikan oleh pihak pengelola objek wisata yakni masalah kualitas pengunjung per tahunnya. Dibutuhkan kesadaran pengelola dalam meningkatkan kualitas pengunjung yang datang di objek wisata. Seperti yang dikatan oleh pihak pengunjung sebagai berikut :

“wisata kita kan baru berjalan 2 tahun jadi kalau dilihat dari datanya lumayan ada peningkatan pengunjung dari tahun pertama” (wawancara WH, Sabtu 21 Juli 2018)

Uraian wawancara tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengunjung dari tahun ke tahun di objek wisata yang ada di Desa Lero. Hal ini mengimplikasikan adanya potensi wisata yang dapat dikembangkan karena banyak menarik perhatian pengunjung. Meskipun ada keluhan dari beberapa aspek seperti aksesibilitas yang belum memadai serta perpikiran yang belum intensif diharapkan kepada pihak pengelola untuk serius dalam pembangunan objek wisata yang ada di Desa Lero sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lero.

b. Rumah Pohon

Dalam proses Pengawasan Rumah Pohon dilakukan guna memonitoring hal-hal apa saja yang masih kurang dalam pengembangan objek wisata baik dari segi daya tarik objek wisata, pemasaran dan pelayanan seperti yang diungkapkan pihak pengelola sebagai berikut :

“untuk hasil dari kunjungan wisatawan kami gunakan untuk membenahi Rumah Pohon, kami juga menambahkan wahana *flying fox* namun belum berfungsi karena belum sepenuhnya aman untuk digunakan jadi kami masih memperbaiki” (Wawancara AF, Jumat 20 Juli 2108)

Berdasarkan uraian wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengelola memanfaatkan hasil dari tarif yang diberikan pengunjung untuk membenahi bangunan objek wisata agar tetap terjaga serta adanya usaha untuk mengembangkan wahana yang ada di objek wisata Rumah Pohon guna menarik perhatian pengunjung.

C. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang pengelolaan kepariwisataan berbasis masyarakat di Desa Lero Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, maka peneliti menemukan hal sebagai berikut :

1. Perencanaan

Berdasarkan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan mengandung poin memberikan manfaat terhadap kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan terhadap masyarakat

serta mampu memberdayakan masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata keterlibatan masyarakat meliputi proses perencanaan dan pengembangan berbagai aktivitas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mampu membangun perekonomian masyarakat yang mandiri.

Dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Lero dapat dikatakan cukup baik dilihat dari antusias masyarakat terhadap adanya pengembangan pariwisata serta dengan melibatkan diri dalam proses perencanaan dimana masyarakat ikut terlibat dalam mengikuti permusyawaratan terkait pengembangan objek wisata yang ada, berkonsultasi bersama dengan pihak pengelola dengan memberikan informasi terkait pengidentifikasian potensi dan permasalahan.

Namun, dari apa yang di temukan peneliti di lapangan, salah satu prinsip kepariwisataan berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dimana prinsip keadilan dan kesetaraan belum terpenuhi. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan penganggaran dalam proses perencanaan kepariwisataan di Desa Lero yang mana masing-masing objek wisata alam Permandian Maipi didanai dengan anggaran dana desa sedangkan objek wisata Rumah Pohon hanya sebatas swadaya dari masyarakat sehingga terjadi kesalahpahaman antar kelompok pengelola.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses penentuan kerja dan pengaturan aktivitas yang akan dilakukan dalam kegiatan pencapaian tujuan dengan menempatkan individu tertentu pada tugas-tugas operasional serta memanfaatkan sumber daya manusia dengan memberikan tanggung jawab kerja yang diberikan secara relatif dalam melakukan aktivitas dalam pencapaian tujuan (Hasibuan 2005 : 127)

Dalam pengelolaan objek wisata di Desa Lero masyarakat berpartisipasi sesuai perencanaan dimana masing-masing individu melakukan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tidak hanya memberikan tugas kepada masyarakat, dalam proses pengelolaan masyarakat ikut andil dalam memberikan sumbangan pikiran, tenaga dan keahlian dalam mengelola objek wisata meliputi tugas juru parkir dan *guide* selain itu masyarakat turut dalam proses pengembagangan dan perawatan objek wisata.

Kehadiran kelompok organisasi sangatlah penting karena meliputi tanggung jawab pengelola dalam melaksanakan tugas pokok operasional dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Hal ini belum sesuai dengan teorinya Murphy (Sunaryo 2013 :139) yang menjabarkan pariwisata berbasis masyarakat sebagai wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan yang ada. Namun dalam pengelolaan pariwisata di Desa Lero masih kurang dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang ada

seperti pada hasil penelitian adanya kekurangan petugas dalam proses pengelolaan.

3. Pelaksanaan

Dalam penelitian ini proses pelaksanaan meliputi proses pengorganisasian dan pengarahan. Telah dijelaskan sebelumnya bagaimana proses pengorganisasian yang terjadi dalam pengeolaan objek wisata di Desa Lero. Pengarahan sendiri dilakukan dengan mengingatkan petugas bagaimana dalam melakukan tugas-tugas operasionalnya.

Masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata turut dalam kegiatan pengembangan objek wisata, menjaga lingkungan serta ikut berpartisipasi dalam mempromosikan objek wisata yang ada di Desa Lero serta mendukung kegiatan kepariwisataan dengan adanya usaha-usaha yang terkait dengan pariwisata. Dengan pariwisata berbasis masyarakat membuat masyarakat terlibat langsung dalam proses pengelolaan sehingga masyarakat dapat merasakan langsung dampak dari kegiatan kepariwisataan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Murphy (Sunaryo 2013 : 139) pariwisata berbasis masyarakat merupakan pemahaman yang berkaitan dengan kepastian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat lokal dari adanya kegiatan kepariwisataan.

4. Pengendalian

Dalam proses Pengendalian, masyarakat secara langsung terlibat dalam mengawasi jalannya proses pengelolaan, memberikan masukan untuk kegiatan pengembangan objek wisata baik itu dalam peningkatan sarana dan prasarana.

Namun dalam proses pengelolaan kepariwisataan berbasis masyarakat di Desa Lero masih kurang dalam hal infrastruktur mulai dari lahan parkir hingga aksesibilitas yang kurang kondusif. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dalam Bab III pasal 5 menjamin keterpaduan antar sektor, merupakan suatu kesatuan sistemik dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan potongan ayat dari Undang-Undang tersebut, dalam pengelolaan objek wisata berbasis masyarakat di Desa Lero belum ada keterpaduan antar pemerintah daerah dalam hal pembangunan aksesibilitas menuju objek wisata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dari tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara maka peneliti dapat tarik kesimpulan yakni:

1. Perencanaan program kerja dalam pengelolaan berdasarkan visi meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan kemandirian masyarakat desa wisata dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kepariwisataan dalam hal ini akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat, mengurangi pengangguran yang ada di Desa Lero. Namun dalam proses perencanaan yang masing-masing objek wisata yang ada di Desa Lero tidak semua berasal dari anggaran dana desa sehingga terjadi kesalahpahaman antar pengelola objek wisata.
2. Pengorganisasian kepariwisataan berbasis masyarakat di Desa Lero sepenuhnya diberikan kepada masyarakat dalam pengelolaannya dengan tujuan masyarakat dapat terberdayakan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Lero khususnya, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat dengan langsung merasakan dampak dari adanya pengelolaan objek wisata. Dengan terbentuknya BUMDes Maipi Lestari selaku pihak pengelola belum mampu memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan memberikan tanggung jawab serta tugas-tugas operasional berkaitan proses pengelolaan

kepada masyarakat yang berangkutan. Ditandai dengan masih kurangnya petugas yang ada di lokasi objek wisata.

3. Pelaksanaan dalam proses pengelolaan objek wisata berbasis masyarakat di Desa Lero mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan gotong royong serta mengajak masyarakat membangun usah-usaha terkait kepariwisataan yang dapat membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Lero.
4. Pengendalian dalam proses pengelolaan objek wisata berbasis masyarakat di Desa Lero ini pihak pengelola masih perlu memperhatikan kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam mendukung perkembangan pariwisata misalnya lahan parkir yang belum memadai serta aksesibilitas menuju objek wisata yang belum diperbaiki. Dengan memperhatikan sarana dan prasarana sendiri sangat mendukung pertumbuhan pariwisata kedepannya semakin mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat.

B. Saran

1. Perencanaan dalam pengelolaan objek wisata harusnya memiliki tujuan dengan memperhitungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan objek wisata baik itu sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung dan perkembangan teknologi, tidak hanya itu dalam perencanaan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Dibutuhkan pembangunan secara berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, sebab besar harapan peningkatan perekonomian masyarakat dari pengelolaan pariwisata serta mampu menjadikan masyarakat mandiri terberdayakan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada.
3. Serta dalam pengelolaannya diharapkan kerjasama antar pihak pengelola dan masyarakat sebagaimana pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan kepuasan terhadap pengunjung sehingga penting bagi pengelola untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kearifan budaya lokal.
4. Diharapkan pula perhatian pemerintah daerah dalam membenahi aksesibilitas menuju objek wisata yang ada karena sangat dibutuhkan kesadaran multipihak dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat yang mana bertujuan dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Affifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung. Alfabeta
- Byars, Lloyd L dan Rue. Lesley W. 2006. *Human Reosourch Management*. Richard D Irwin Inc.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta. Rajagrafindo Persada
- Handayaniingrat, S. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. Toko Gunung Agung
- Hasibuan. SP, Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT. Alexmedia Kaputindi
- Manulang, M. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Resdakarya
- Partono. 2002. *Industri Pariwisata*. Pandegelang
- Pendit, Nyoman S.. 2003. *Ilmu Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya*. Jakarta: Pardnya Paramita
- Pitana, I Gede. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Ranupandojo, Heidjrachman dan Husnan, Suad. 1996. *Manajemen Personalialia*. Jakarta. BPFE
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung. Refika Aditama

- Suansri, Patjana. 2003. *Community Based Tourism Handbook*. Bangkok Thiland: Responsible Eco Logical Socisl Tours (REST) Project
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sule, Erni Tisnawati. Saefullah, [83] wan. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. Kencana Media Perdana Grup
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Medi
- Sutarno, NS. 2004. *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta. Agung Seto
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset
- Terry, George R dan Rue, Lesley W. 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara

Jurnal

- Jurnal Ilmiah RUANG. 2015 : *perencanaan desa Wisata dengan Pendekatan Konsep Community Based Tourism (CBT*. Vol. 1, No. 2.). UNDIP
- Prakoso Bhairawa Putera, 2011. *Paradigma baru tata kelola*. Destirasi. Edisi 18 Mei 2011. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Timothy.D.J. 1999. *Participatory Planning a View of Tourism in Indonesia*. Dalam Jurnal Ilmiah KAwistra. 2013. Vol. 3, No. 2
- Sugi Rahayu, 2013. *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta*. Vol. 3, No. 2. Universitas Negeri Yogyakarta

Dokumen

- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Bab III pasal 5
- Peraturan Desa Lero No. 15 Tahun 2016 tentang pembentukan BUMDes Maipi Lestari

Internet

<http://wartakita.id.html> Wisata Edukasi Rumah Pohon di Masamba. 2016. (diakses pada, 26 agustus 2017)

<http://news.rakyatku.com.html>. Rumah Pohon. 2016. (diakses pada 26 maret 2018)

<http://lipi.go.id.html> Prakoso Bhairawa Putera, Paradigma baru tata kelola. 2011. (diakses pada Minggu 10 Juli 2018)

LAMPIRAN

1. Dokumentasi

Objek wisata permandian alam maipi



Objek wisata Rumah pohon



Objek wisata air terjun sarambu alla



Wawancara dengan kepala desa Lero



Wawancara dengan kepala desa Lero



Wawancara dengan pengunjung



Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Kabupaten Luwu Utara



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP)

Jalan Simpangxiang No.27 Telp/Fax 0473-21536 992961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 08506/0000/SKP/DPMPTSP/VI/2018

- Membaca
Memeriksa
Mengingat
- 1. Penerimaan Surat Keterangan Penelitian an. Widi Salfiri beserta lampirannya.
 - 2. Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/180/VI-Kesbangpol, tanggal 26 Juni 2018
 - 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberian Surat Keterangan Penelitian;
 - 6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penerimaan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara;

MEMUTUSKAN

- Meresahkan
- 1. Menetapkan Surat Keterangan Penelitian kepada :
Nama : Widi Salfiri
Nomor : 0
Telepon :
Alamat : Des. Amsonggan I, Desa Pao Kecamatan Malangké Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / Universitas Muhammadiyah Makassar
Instansi :
Jabatan : Tata Kelola Kelayakan dan Penerimaan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
Pendidikan :
Lokasi : Dinas Kelayakan dan Pariwisata Kab. Luwu Utara, Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara
Pendidikan : Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 18 Juni - 16 Agustus 2018.
2. Maksimal hanya digunakan Peningkatan-Undangun yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dibuat kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Dibuktikan di Masamba
Pada Tanggal 03 Juli 2018

KEPALA DPMPTSP

AHMAD LENTI SYAH
NIP. 196604151998030002

Retribusi : Rp. 0,00

Ko. Seri : 08506

Ditampilkan kepada :

1. Lembar Pertama yang beranggotakan:
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

DPMPTSP
www.dpmptsp.luwuutara.go.id